

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 30 September 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang
berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 September 2021
dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Ririek Adriansyah
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Karang Tengah Raya Pertanian I/99 RT 05 RW 04
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Heri Supriadi
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Rancamayar No. 18 RT 001 RW 008
Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal, Bandung
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ 021 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 November 2021



SEPULUH RIILU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
2F2AJX104139673

Ririek Adriansyah
Direktur Utama

Heri Supriadi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (TIDAK DIAUDIT)**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3 - 4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-122

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2020 (diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3,33,38	17.491	20.589
Aset keuangan lancar lainnya	4,33,38	667	1.303
Piutang usaha			
Pihak berelasi	5,33,38	1.351	1.644
Pihak ketiga	5	9.922	9.695
Aset kontrak	6,33,38	1.128	1.036
Piutang lain-lain	38	170	214
Persediaan	7	825	983
Aset tersedia untuk dijual	12	1.061	39
Biaya kontrak	9	656	454
Pajak dibayar di muka	28a	2.721	3.170
Tagihan restitusi pajak	28b	651	854
Aset lancar lainnya	8,33	4.223	6.522
Jumlah Aset Lancar		<u>40.866</u>	<u>46.503</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset kontrak	6,33,38	171	203
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	10,38	10.081	4.045
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi	11	130	192
Biaya kontrak	9	1.660	1.254
Aset tetap	12,36	161.118	160.923
Aset hak guna	13	16.868	18.566
Aset takberwujud	15	7.269	6.846
Aset pajak tangguhan - bersih	28f	3.575	3.578
Aset tidak lancar lainnya	14,28,33,38	4.762	4.833
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>205.634</u>	<u>200.440</u>
JUMLAH ASET		<u>246.500</u>	<u>246.943</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	16,38		
Pihak berelasi	33	873	928
Pihak ketiga		12.752	16.071
Liabilitas kontrak	18a,33	7.697	7.834
Utang lain-lain	38	854	578
Utang pajak	28c	4.684	2.713
Beban yang masih harus dibayar	17,33,38	13.382	14.265
Deposito pada pelanggan	33	2.222	2.024
Utang bank jangka pendek	19a,33,38	10.618	9.934
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	19b,33,38	9.398	9.350
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	13,38	5.887	5.396
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>68.367</u>	<u>69.093</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	28f	610	561
Liabilitas kontrak	18b,33	1.119	1.004
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	32	1.226	1.254
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	31	13.589	12.976
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	20,33,38	34.352	30.561
Liabilitas sewa	13,38	8.247	10.221
Liabilitas lainnya		177	384
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>59.320</u>	<u>56.961</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>127.687</u>	<u>126.054</u>
EKUITAS			
Modal saham	22	4.953	4.953
Tambahan modal disetor		2.711	2.711
Komponen ekuitas lainnya	23	338	374
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	30	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		81.381	79.152
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		104.720	102.527
Kepentingan nonpengendali	21	14.093	18.362
JUMLAH EKUITAS		<u>118.813</u>	<u>120.889</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>246.500</u>	<u>246.943</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN	24,33	106.043	99.941
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	26,33	(26.978)	(25.098)
Beban penyusutan dan amortisasi	12,13,15	(22.183)	(21.038)
Beban karyawan	25	(11.018)	(10.406)
Beban interkoneksi	33	(3.715)	(4.261)
Beban umum dan administrasi	27,33	(4.034)	(4.234)
Beban pemasaran	33	(2.371)	(2.356)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih		43	(2)
Penghasilan lain-lain - bersih		514	465
LABA USAHA		36.301	33.011
Penghasilan pendanaan	33	450	644
Biaya pendanaan	33	(3.387)	(3.457)
Rugi bersih entitas asosiasi	11	(104)	(136)
Rugi penurunan nilai investasi	11	-	(308)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		33.260	29.754
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	28d		
Pajak kini		(7.539)	(7.378)
Pajak tangguhan		(58)	575
		(7.597)	(6.803)
LABA PERIODE BERJALAN		25.663	22.951
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	23	36	181
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	11	0	-
<i>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Rugi aktuarial - bersih	31	0	-
Penghasilan komprehensif lain - bersih		36	181
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		25.699	23.132
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		18.872	16.679
Kepentingan nonpengendali	21	6.791	6.272
		25.663	22.951
Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		18.908	16.860
Kepentingan nonpengendali		6.791	6.272
		25.699	23.132
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)	29		
Laba bersih per saham		190,51	168,37
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		19.050,65	16.836,89

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk							Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal Saham	Tambahan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih			
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo, 1 Januari 2021		4.953	2.711	374	15.337	79.152	102.527	18.362	120.889	
Transaksi entitas sepengendali		-	-	(72)	-	-	(72)	67	(5)	
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	9	9	
Dividen kas	30	-	-	-	-	(16.643)	(16.643)	(11.136)	(27.779)	
Laba periode berjalan	21	-	-	-	-	18.872	18.872	6.791	25.663	
Penghasilan komprehensif lain - bersih		-	-	36	-	-	36	-	36	
Saldo, 30 September 2021		4.953	2.711	338	15.337	81.381	104.720	14.093	118.813	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk							Keuntungan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal Saham	Tambahan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih			
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo, 31 Desember 2019		4.953	2.711	408	15.337	76.152	99.561	17.689	117.250	
Dampak penerapan standar akuntansi baru		-	-	(48)	-	606	558	(50)	508	
Saldo, 1 Januari 2020		4.953	2.711	360	15.337	76.758	100.119	17.639	117.758	
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	(14)	(14)	
Dividen kas	30	-	-	-	-	(15.262)	(15.262)	(7.725)	(22.987)	
Laba periode berjalan	21	-	-	-	-	16.679	16.679	6.272	22.951	
Penghasilan komprehensif lain - bersih		-	-	181	-	-	181	-	181	
Saldo, 30 September 2020		4.953	2.711	541	15.337	78.175	101.717	16.172	117.889	

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		104.792	96.087
Penerimaan restitusi pajak		3.463	2.912
Penerimaan dari pendapatan bunga		455	652
Pembayaran kas untuk beban		(32.991)	(28.880)
Pembayaran kas kepada karyawan		(10.302)	(9.832)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(6.154)	(7.625)
Pembayaran beban bunga		(3.377)	(3.541)
Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah		(3.331)	(2.337)
Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih		(1.535)	(35)
(Pembayaran) penerimaan kas lainnya - bersih		(48)	49
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		50.972	47.450
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari aset keuangan lancar lainnya - bersih		633	274
Hasil dari penjualan aset tetap	12	516	141
Hasil dari klaim asuransi	12	106	218
Pembelian aset tetap	12,40	(20.172)	(17.538)
Penambahan penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	10	(5.689)	(458)
Pembelian aset takberwujud	15,40	(2.009)	(1.916)
Penambahan penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi	11	(42)	-
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	11	-	5
Kenaikan uang muka dan aset lainnya - bersih		(135)	(16)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(26.792)	(19.290)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	19,20	38.163	17.629
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	19,20	(33.624)	(19.291)
Pembayaran dividen kepada pemegang saham perusahaan		(16.643)	(15.262)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak	21	(11.136)	(7.725)
Pembayaran liabilitas sewa	13	(4.102)	(4.541)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		(27.342)	(29.190)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(3.162)	(1.030)
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		64	208
PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT EKSPEKTASIAN		(0)	(0)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	3	20.589	18.242
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3	17.491	17.420

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 22).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan:

- i. Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- ii. Kebutuhan Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- iii. Kebutuhan Perseroan untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan di atas sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 35 tanggal 18 Juni 2021. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0426883 tanggal 09 Juli 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Keputusan Menkumham No. AHU-0038942.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perusahaan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha yang secara umum meliputi:

- i. Usaha utama:
 - (a) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan.
 - (b) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
 - (c) Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

ii. Usaha penunjang:

- (a) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
- (b) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
- (c) Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Domisili Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap lima tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut di atas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPPPI") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penerbit uang elektronik	Izin Bank Indonesia 11/432/DSAP	Penerbit uang elektronik	3 Juli 2009
Izin penyelenggaraan pengiriman uang	Izin Bank Indonesia 11/23/bd/8	Penyelenggaraan pengiriman uang	5 Agustus 2009
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	846/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap sambungan internasional	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	79/KEP/M.KOMINFO/ 2018	Jaringan tetap tertutup	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	449/KEP/M.KOMINFO/ 02/2020	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i> dan <i>packet switched</i>	31 Mei 2016

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	046/KEP/M.KOMINFO/02/202	Jaringan sistem komunikasi data	31 Oktober 2016
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/M.KOMINFO/12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/M.KOMINFO/16/2017	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	1004/KEP/M.KOMINFO/2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018
Izin penyelenggaraan jasa untuk kategori layanan IPTV	022/KEP/M.KOMINFO/2021	Jasa multimedia layanan IPTV	25 Februari 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	073/KEP/M.KOMINFO/02/2021	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	23 Agustus 2021

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan

i. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada RUPST yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 34 tanggal 18 Juni 2021 dan No. 12 tanggal 10 Juli 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, masing-masing adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro	Rhenald Kasali
Komisaris	Arya Mahendra Sinulingga	Alex Denni
Komisaris	Rizal Mallarangeng	Rizal Mallarangeng
Komisaris	Isa Rachmatarwata	Ahmad Fikri Assegaf
Komisaris	Ismail	Ismail
Komisaris	Marcelino Rumambo Pandin	Marcelino Rumambo Pandin
Komisaris Independen	Bono Daru Adji	Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen	Wawan Iriawan	Wawan Iriawan
Komisaris Independen	Abdi Negara Nurdin	Chandra Arie Setiawan
Direktur Utama	Ririek Adriansyah	Ririek Adriansyah
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko*	Heri Supriadi	Heri Supriadi
Direktur <i>Digital Business</i>	Muhamad Fajrin Rasyid	Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur <i>Strategic Portfolio</i>	Budi Setyawan Wijaya	Budi Setyawan Wijaya
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Edi Witjara	Edi Witjara
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Bogi Witjaksono	Dian Rachmawan
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Afriwandi	Afriwandi
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Herlan Wijanarko	Herlan Wijanarko
Direktur <i>Consumer Service</i>	FM Venusiana R	FM Venusiana R

*Nomenklatur Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ditetapkan pada RUPST Tahun Buku 2020, mengubah nomenklatur Direktur Keuangan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)

ii. Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit

Susunan Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit Perusahaan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Ketua	Bono Daru Adji	Chandra Arie Setiawan
Anggota	Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro	Marsudi Wahyu Kisworo
Anggota	Wawan Iriawan	Wawan Iriawan
Anggota	Abdi Negara Nurdin	Marcelino Rumambo Pandin
Anggota	Emmanuel Bambang Suyitno	Emmanuel Bambang Suyitno
Anggota	Edy Sihotang	Sarimin Mietra Sardi
Anggota	-	Ahmad Fikri Assegaf
Corporate Secretary	Andi Setiawan	Andi Setiawan
Internal Audit	Harry Suseno Hadisoebroto	Harry Suseno Hadisoebroto

iii. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 20.817 orang dan 25.348 orang.

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Pada Rapat Umum Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2005 dan RUPST pada tanggal 29 Juni 2007, 20 Juni 2008, dan 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III, dan IV program Perusahaan untuk membeli kembali saham Seri B yang telah diterbitkan.

Selama periode 21 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2007, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali 211.290.500 saham dari publik (program pembelian kembali saham tahap I). Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual seluruh saham tersebut.

Pada RUPST tanggal 19 April 2013, sebagaimana diaktakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn., No. 38 tanggal 19 April 2013, para pemegang saham menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas *treasury stock* yang diakuisisi dalam tahap III. Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham Seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham Seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham Seri B (Catatan 22). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 47.619.592 ADS telah dicatatkan pada NYSE (Catatan 22).

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 20b.i).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan menjual sisa saham treasury tahap III.

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan menjual saham treasury tahap IV.

Pada RUPST tanggal 27 April 2018 yang diaktakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 54, para pemegang saham menyetujui pembatalan 1.737.779.800 saham treasury dengan mengurangi modal saham Perseroan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 September 2021	31 Desember 2020	30 September 2021	31 Desember 2020
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM")/ 26 Mei 1995	1995	65	65	94.648	103.652
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya/ 17 Mei 2001	1995	100	100	40.139	25.285
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	18.415	17.708
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TELIN"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	12.240	12.187
PT Graha Sarana Duta ("GSD"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	100	100	5.830	6.163
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	5.024	4.484
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	3.595	4.154
PT PINS Indonesia ("PINS"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	1.680	1.868
PT Metra-Net ("Metra-Net"), Jakarta, Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	1.640	1.320
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infra"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	100	1.094	1.074

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 September 2021	31 Desember 2020	30 September 2021	31 Desember 2020
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan <i>Network</i> , Access Point ("NAP"), <i>Voice Over Data</i> ("VOD"), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 September 2021	31 Desember 2020	30 September 2021	31 Desember 2020
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, <i>outsourcing</i> , dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	5.092	6.031
PT Metra Digital Investama ("MDI"), Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan informasi dan teknologi multimedia, hiburan dan investasi/ 8 Januari 2013	2013	100	100	4.919	3.461
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., ("Telin Singapore"), Singapore	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	3.428	3.320
Telekomunikasi Indonesia International Ltd. ("Telin Hong Kong"), Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	2.560	2.652
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa <i>call center</i> / 22 September 1999	1984	100	100	2.520	2.390
PT Telkom Landmark Tower ("TLT"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	2.179	2.204
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	1.283	1.371

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 September 2021	31 Desember 2020	30 September 2021	31 Desember 2020
PT Metra Digital Media ("MD Media"), Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	100	100	1.406	1.115
PT Melon Indonesia ("Melon"), Jakarta, Indonesia	Jasa penjualan konten digital/ 14 November 2016	2010	100	100	1.154	848
PT Persada Sokka Tama ("PST"), Jakarta, Indonesia	Penyediaan sarana prasarana jaringan telekomunikasi/ 19 Februari 2019	2008	95	95	999	824
Telekomunikasi Indonesia International (TL) S.A. ("Telkomcel"), Dili, Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	774	719
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN"), Petaling Jaya, Malaysia	Jasa satelit/ 14 Desember 2017	1996	70	70	602	669
PT Telkomsel Mitra Inovasi ("TMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa konsultan manajemen bisnis dan investasi modal/ 18 Januari 2019	2019	100	100	594	594
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	100	100	566	480
PT Swadharma Sarana Informatika ("SSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan ATM/ 2 April 2018	2001	51	51	527	577
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	100	100	312	316
PT Digital Aplikasi Solusi ("Digiserve"), sebelumnya PT Teltranet Aplikasi Solusi Jakarta, Indonesia	Jasa sistem komunikasi/ 29 Agustus 2014	2014	100	49	291	-
PT Graha Yasa Selaras ("GYS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	279	289

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 September 2021	31 Desember 2020	30 September 2021	31 Desember 2020
Telekomunikasi Indonesia International Inc., ("Telkom USA"), Los Angeles, USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	169	115
PT Nutech Integrasi ("Nutech"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia sistem integrator/ 13 Desember 2017	2001	60	60	128	137
Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., ("Telkom Australia"), Sydney, Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	73	88
PT Metraplaza ("Metraplaza"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan & e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	66	260

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

Mitratel

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 31 tanggal 21 Agustus 2021 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. para pemegang saham Mitratel memutuskan dan menyetujui perubahan mengenai status Mitratel dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dengan nama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. melalui Penawaran Umum Perdana saham melalui pasar modal dengan skema *Initial Public Offering* ("IPO"). Mitratel akan mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 25.540.000.000 lembar saham baru atau sebesar 29,85% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO untuk ditawarkan kepada masyarakat (Catatan 41).

Metra

Pada tanggal 29 Agustus 2014, Metra dan Telstra Holding Singapore Pte. Ltd. mendirikan PT Teltranet Aplikasi Solusi ("Teltranet"). Kepemilikan saham Metra pada Teltranet adalah sebesar 51%, Metra tidak memiliki pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Teltranet, dicatat sebagai kepemilikan pada entitas asosiasi.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Saham tanggal 31 Agustus 2021, Metra membeli saham Teltranet yang dimiliki oleh Telstra Holdings Singapore Pte. Ltd. sebanyak 13.115.477 lembar atau setara dengan 49% kepemilikan saham dengan nilai perolehan sebesar AU\$1, sehingga menjadi entitas anak Metra.

Harga perolehan transaksi akuisisi saham Teltranet lebih besar dibandingkan porsi kepemilikan pada nilai buku aset neto yaitu sebesar Rp73 miliar per tanggal 30 September 2021, selisih tersebut dicatat sebagai *provisional goodwill* (Catatan 11).

e. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 24 November 2021.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp") dan jutaan US\$, kecuali dinyatakan lain. Untuk angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang masih mengandung nilai tetapi di bawah Rp1 miliar dan US\$ 1 juta disajikan dengan angka nol.

Standar akuntansi baru

Pada tanggal 1 Januari 2021, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- i. Amandemen PSAK 22 : Kombinasi Bisnis
- ii. Amandemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- iii. Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2022:

- i. Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis
Amandemen ini mengatur tentang referensi ke Kerangka Konseptual dengan mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- ii. Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
- iii. Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan
Amandemen ini mengklarifikasi *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan.
- iv. Amandemen PSAK 73: Sewa
Amandemen ini mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2023:

- i. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
Amandemen ini mengklarifikasi klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan amandemen ini juga mengubah istilah “signifikan” menjadi “material” dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material.
- ii. Amandemen PSAK 16: Aset Tetap
Amandemen ini mengatur tentang perlakuan atas hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
- iii. Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
Amandemen ini memberi definisi baru dari “estimasi akuntansi” dan penjelasannya.

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini bila Grup memiliki mayoritas atau kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah ia memiliki kuasa atas *investee*, termasuk:

- i. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii. Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of interests*).

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas di laporan posisi keuangan terdiri dari kas di tangan, kas dan bank, dan deposito jangka pendek yang sangat likuid dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan deposito jangka pendek, sesuai definisi di atas, setelah dikurangi dengan saldo cerukan bank karena dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas Grup.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 2u).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak. Kepemilikan 20% atau lebih hak suara *investee* (dimiliki secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan) dianggap menimbulkan pengaruh signifikan, kecuali dapat dijelaskan secara jelas bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Sebaliknya, kepemilikan kurang dari 20% hak suara dianggap tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa sebenarnya terdapat pengaruh signifikan.

Adanya pengaruh signifikan biasanya akan dibuktikan dengan satu atau beberapa cara sebagai berikut:

- i. Keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara dari *investee*;
- ii. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen dan distribusi lainnya;
- iii. Transaksi material di antara investor dan *investee*;
- iv. Pertukaran personel manajerial; atau
- v. Penyediaan informasi teknis penting.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- i. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu, dan
- ii. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam "Penyertaan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi (lanjutan)

Untuk tujuan pelaporan investasi dengan menggunakan metode ekuitas tersebut, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi provisi penurunan nilai yang dihitung berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah menetapkan metodologi perhitungan estimasi penyisihan tersebut berdasarkan pengalaman historis kredit tak tertagih yang kemudian disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Piutang dihapuskan pada tahun ditetapkan tidak tertagih (Catatan 2u).

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan voucher prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih ditentukan dengan mengestimasi harga jual, dikurangi estimasi biaya penjualan atau menentukan biaya penggantian yang berlaku.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

Aset takberwujud, kecuali *goodwill* diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-30
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Peralatan pengolahan data	3-20
Kendaraan	4-8
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Aset <i>Customer Premises Equipment</i> ("CPE")	4-5
Peralatan lainnya	2-5

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Berdasarkan reviu umur manfaat aset tetap khususnya beberapa peralatan produksi mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan atau dijual.

m. Sewa

PSAK 73 menetapkan model komprehensif untuk mengidentifikasi perjanjian sewa dan perlakuannya dalam laporan keuangan Penyewa dan Pesewa. PSAK 73 memperkenalkan model pengendalian untuk identifikasi sewa, membedakan antara sewa dan kontrak layanan berdasarkan apakah ada aset identifikasi yang dikendalikan oleh pelanggan.

Grup menerapkan PSAK 73 pada 1 Januari 2020 dengan menggunakan pendekatan retrospektif modifikasi dengan mengakui dampak kumulatif penerapan awal PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020. Dengan demikian data komparasi tahun 2019 tidak disajikan kembali dan disajikan sesuai standar sebelumnya dan interpretasi terkait.

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing kontrak, kecuali dalam kasus dimana Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup memilih tindakan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73, yang antara lain:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;
- akuntansi untuk sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;
- penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa dimana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;
- menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya diidentifikasi berdasarkan PSAK 30R, dan tidak menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya tidak diidentifikasi berdasarkan standar ini;
- tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan
- untuk tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak guna untuk sewa dimana aset dasar adalah aset bernilai rendah (yaitu aset dasar dengan nilai maksimum US\$5.000 atau Rp50 juta dalam kondisi baru).

PSAK 73 juga mengizinkan Grup untuk melanjutkan penilaian sewa historis yang memungkinkan Grup untuk tidak menilai kembali hasil penilaian Grup sebelumnya tentang identifikasi sewa, klasifikasi sewa dan Grup telah memilih untuk membawa saldo penilaian sewa historis dan mengandalkan penilaian yang telah dibuat berdasarkan PSAK 30 dan ISAK 8 dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa. Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak sewa yang dibuat atau diubah pada atau setelah 1 Januari 2020.

i. Grup sebagai *lessee*

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat dari aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Instalasi dan peralatan transmisi	3-25
Catu daya	3-20
Kendaraan	4-8
Lain-lain	2-25

Jika kepemilikan aset sewaan dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

i. Grup sebagai *lessee* (lanjutan)

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang melaksanakan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental karena tingkat suku bunga yang tersirat dalam sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan, berakhir dalam 12 bulan setelah 1 Januari 2020 dan sewa bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Grup sebagai *lessor*

Berdasarkan PSAK 73, lessor terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan memperhitungkan kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Sewa dimana Grup mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal awal dan dinilai kembali hanya jika ada modifikasi sewa.

Pada tanggal dimulainya, Grup mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dengan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Investasi bersih dalam sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jaminan nilai residu yang diberikan kepada lessor oleh lessee. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh lessee dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang menggunakan opsi untuk mengakhiri.

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 71, penyisihan kerugian kredit yang diharapkan telah diakui sebagai "Piutang Lain-lain".

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset tetap dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Jika suatu perjanjian mengandung komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan pendapatan PSAK 72 dari kontrak dengan pelanggan untuk mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang dan/atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia, TS Global Network Sdn. Bhd., dan Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd. yang menggunakan Ringgit Malaysia.

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	30 September 2021		31 Desember 2020	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	14.310	14.315	14.040	14.060
Dolar Australia ("AU\$") 1	10.306	10.311	10.738	10.756
Dolar Singapura ("SGD") 1	10.516	10.523	10.591	10.607
Dolar Taiwan Baru ("TWD") 1	514,32	514,69	499,61	500,46
Euro ("EUR") 1	16.604	16.611	17.209	17.239
Yen Jepang ("JPY") 1	127,79	127,87	135,91	136,15
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.416	3.421	3.477	3.485
Pataca Makau ("MOP") 1	1.782	1.785	1.756	1.761
Dolar Hong Kong ("HKD") 1	1.837	1.838	1.811	1.814

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Penjabaran valuta asing (lanjutan)

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2k).

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

Grup mengadopsi PSAK 72 pada 1 Januari 2020 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui efek kumulatif dari awal penerapan PSAK 72 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020.

Grup telah memilih untuk menerapkan pendekatan praktis berikut pada tanggal transisi:

- (i) Kontrak yang telah diselesaikan - Grup menerapkan PSAK 72 hanya untuk kontrak pelanggan yang belum selesai pada 1 Januari 2020; dan
- (ii) Modifikasi kontrak - alih-alih menerapkan pendekatan retrospektif untuk mengukur efek kumulatif dari modifikasi kontrak sejak tiap modifikasi dilakukan; Grup mengumpulkan efek dari semua modifikasi kontrak yang terjadi sebelum 1 Januari 2020 untuk:
 - (a) Mengidentifikasi kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan;
 - (b) Menentukan harga transaksi dari kontrak modifikasian terbaru; dan
 - (c) Mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan pada 1 Januari 2020.

Selain itu, Grup juga memilih untuk menerapkan pendekatan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pendanaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengiriman barang atau jasa tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun, dalam mengadopsi PSAK 72.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk setiap jenis pendapatan:

i. Mobile

Pendapatan dari *mobile* terutama terdiri dari pendapatan dari layanan seluler yang antara lain: layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet dan data, dan layanan *Short Messaging Service* ("SMS"). Layanan tersebut ditawarkan secara pascabayar atau prabayar, dimana untuk prabayar, penjualan paket perdana (juga dikenal sebagai kartu SIM dan voucher pengisian awal) dan voucher pengisian pulsa diakui pada awalnya sebagai liabilitas kontrak.

Seluruh pendapatan layanan *mobile* diakui berdasarkan metode *output*, baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

i. Mobile (lanjutan)

Untuk layanan yang dijual dalam paket bundel, total penerimaan dari pelanggan dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri untuk setiap produk dan/atau layanan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket yang dijual oleh Grup hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama. Karena itu, pola pengakuan pendapatan umumnya tidak dipengaruhi oleh alokasi.

Pembayaran yang diterima dialokasikan antara layanan telekomunikasi dan poin yang dikeluarkan, dimana pembayaran dialokasikan ke poin yang setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar poin ditentukan berdasarkan informasi historis terkait dengan tingkat penebusan poin penghargaan. Nilai wajar poin yang dikeluarkan ditanggung dan diakui sebagai pendapatan pada saat poin tersebut ditebus atau telah kedaluwarsa.

ii. Consumer

Pendapatan dari *consumer* terutama terdiri dari pendapatan telepon tidak bergerak dan layanan Indihome. Pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak berasal dari pelanggan yang hanya berlangganan layanan telepon tidak bergerak. Sedangkan pendapatan dari layanan Indihome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk ritel. Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan.

Grup memiliki paket layanan bundel bernama "Indihome". Dalam paket ini, pelanggan dapat berlangganan kombinasi layanan consumer (misalnya telepon, data dan internet, serta TV berbayar).

Seluruh layanan *consumer* diakui menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

Pelanggan mungkin diharuskan membayar biaya di muka pada saat dimulainya kontrak. Biaya di muka dianggap sebagai hak material karena pelanggan tidak diharuskan membayar biaya di muka ketika pelanggan memperbarui layanan di luar periode kontrak asli. Grup menilai opsi pembaruan sebesar pembayaran yang diterima dari biaya di muka untuk layanan instalasi. Grup menanggung nilai tersebut dan mengakuinya sebagai pendapatan berdasarkan metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Grup memperkirakan jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iii. Enterprise

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* terutama terdiri dari pendapatan dari penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan jasa lainnya (misal penjualan periferal, *manage service*, *call center*, *e-health*, *e-payment*, dan lain-lain). Beberapa kontrak dengan pelanggan perusahaan dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan.

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual atau waktu yang telah berlalu jika penyediaan layanan tidak tergantung pada penggunaan (yaitu menit suara, *kilobyte data*, dan lain-lain), kecuali untuk penjualan barang yang diakui pada waktu tertentu, karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup. Pendapatan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi pada waktu tertentu diakui ketika pengendalian barang dipindahkan ke pelanggan, biasanya ketika pelanggan memiliki fisik barang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

iii. *Enterprise* (lanjutan)

Beberapa perjanjian dengan pelanggan *enterprise* ditawarkan sebagai produk bundel. Untuk pengaturan yang dibundel, produk dan/atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri ketika secara terpisah dapat diidentifikasi dari janji-janji lain dalam kontrak dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri. Total pembayaran dialokasikan untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda yang telah dimasukkan dalam kontrak, berdasarkan harga jualnya yang berdiri sendiri. Harga jual yang berdiri sendiri ditentukan berdasarkan harga yang dapat diobservasi di mana produk dan/atau jasa individual dijual secara terpisah, disesuaikan dengan kondisi pasar dan diskon normal yang sesuai. Ketika harga yang dapat diobservasi tidak tersedia, biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin digunakan untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri.

Kontrak tertentu dengan pelanggan *enterprise* dapat menimbulkan imbalan variabel karena harga kontrak tergantung pada peristiwa di masa mendatang (misalnya kontrak berbasis penggunaan atau kontrak berbasis bagi hasil). Dalam memperkirakan imbalan variabel ini, Grup diharuskan untuk menggunakan metode nilai yang diharapkan atau metode jumlah yang paling mungkin berdasarkan metode yang lebih baik memprediksi jumlah pembayaran yang menjadi haknya. Grup menentukan bahwa metode nilai yang paling diharapkan adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam memperkirakan imbalan variabel untuk satu kontrak dengan sejumlah besar kemungkinan hasil.

Sebelum memasukkan jumlah imbalan variabel dalam harga transaksi, Grup mempertimbangkan apakah jumlah imbalan variabel dibatasi. Grup menentukan bahwa taksiran imbalan variabel tidak dibatasi berdasarkan pengalaman historisnya, estimasi bisnis, dan kondisi ekonomi saat ini dan hanya mencakup imbalan variabel sepanjang kemungkinan besar pembalikan signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan imbalan variabel selanjutnya diselesaikan.

Ketika pihak lain terlibat dalam menyediakan produk dan/atau jasa kepada pelanggan, Grup bertindak sebagai prinsipal jika Grup mengendalikan produk dan/atau jasa yang ditentukan sebelum produk dan/atau jasa tersebut ditransfer ke pelanggan. Pendapatan dicatat pada jumlah bersih yang diterima (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok), ketika, pada dasarnya, Grup telah bertindak sebagai agen dan mendapat komisi dari pemasok produk dan/atau jasa yang dijual.

iv. *Wholesale and International Business Services* (“WIB”)

Pendapatan dari WIB terutama terdiri dari jasa interkoneksi untuk interkoneksi panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan Grup (panggilan masuk) dan panggilan antara pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan Grup (transit) dan jasa jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode *output* menggunakan basis *traffic* aktual yang tercatat untuk bulan tersebut.

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan, yang pada dasarnya terdiri dari komisi penjualan dan biaya pemenuhan kontrak, pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan. Biaya-biaya ini kemudian diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan periode dan pola pengiriman produk atau jasa terkait ke pelanggan. Biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan dibebankan pada saat terjadinya atau sesuai dengan standar terkait lainnya.

Pendapatan dari transaksi *lessor*

Pendapatan dari transaksi *lessor* terdiri dari pendapatan dari sewa menara telekomunikasi dan sewa lainnya. Pendapatan sewa diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

(a) ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan

(b) ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

t. Pajak

Pajak Penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau secara substantif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT Tahunan") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

Pemeriksaan pajak

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak tangguhan

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan berlaku terhadap penghasilan kena pajak ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

Pajak tangguhan suatu transaksi diakui di luar laba rugi, oleh karena itu pajak tangguhan atas transaksi tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau diakui langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh Otoritas Pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk dipulihkan atau diselesaikan.

Pajak pertambahan nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pajak final

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-Lain - bersih".

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain. Grup mengadopsi PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur pada harga transaksi yang telah ditentukan berdasarkan PSAK 72.

Agar aset keuangan dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari perolehan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

(a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, dan aset tidak lancar lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- (b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif per 30 September 2021.

- (c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai.

- (d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi *SPPI testing* diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

(d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Aset keuangan yang dimiliki untuk dijual diungkapkan sebagai bagian dalam catatan aset keuangan lancar, sementara itu yang lain diungkapkan dalam investasi jangka panjang dalam utang dan instrumen ekuitas.

Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL")

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian dalam 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang umurnya.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk model provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) yaitu kondisi pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Penghapusan piutang usaha dilakukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau (b) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(b) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini secara umum berlaku untuk pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat mengacu ke Catatan 20 Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Lainnya.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- (i) situasi bisnis yang normal;
- (ii) peristiwa *default*; dan
- (iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Akuntansi lindung nilai

Grup tidak menerapkan akuntansi lindung nilai.

v. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Grup diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui pada laporan laba rugi sebagai beban penerbitan sukuk.

Sukuk Ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

w. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

x. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

z. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

aa. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

ab. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi konsolidasian.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

ac. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menanggukannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

ad. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat keputusan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan yang menyertainya, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian tentang asumsi dan perkiraan ini dapat menghasilkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode mendatang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

i. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat. Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 28.

ii. Estimasi dan asumsi

Estimasi dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi pada saat tanggal pelaporan yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

(a) Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 31 dan 32.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(b) Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan reviu atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 12.

(c) Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian - Grup sebagai *lessee*

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan masa sewa, jika cukup masuk akal untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan sewa, mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Grup menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kendali yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak opsi perpanjangan atau penghentian.

(d) Kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk deposito berjangka dan instrumen utang pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(d) Kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan (lanjutan)

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5.

Terkait efek pandemi Covid-19, Grup tidak merubah definisi dari kenaikan risiko kredit yang signifikan maupun definisi gagal bayar. Grup juga mengamati perubahan dari keserupaan karakteristik risiko dari piutang usaha tertentu dengan mengevaluasi segmentasi portofolio pelanggan, dimana pelanggan tersebut mungkin terlibat dalam industri bisnis, atau berlokasi di area, yang telah terpengaruh, atau lebih rentan terhadap pandemi. Grup telah mengkaji ulang model yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan informasi terkini yang wajar dan terdukung untuk lebih mencerminkan perubahan kondisi saat ini. Metode dan pendekatan akan terus dimonitor dan diperbaharui jika terdapat tambahan informasi yang wajar, terdukung, dan tersedia; termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) dan masukan lainnya.

(e) Pendapatan

(i) Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan

Grup menyediakan jasa teknologi informatika dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan. Produk sesuai pesanan pelanggan terdiri dari berbagai barang dan/atau jasa yang dijual dalam satu rangkaian tidak terpisah untuk memberikan layanan solusi terintegrasi kepada pelanggan. Selain produk sesuai pesanan pelanggan, Grup juga menyediakan beberapa produk standar sebagai bagian dari solusi terintegrasi dalam kontrak dengan pelanggan. Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan dalam kontrak tersebut. Jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan akan menentukan waktu pengakuan pendapatan untuk kontrak tersebut.

Grup menelaah penentuan kewajiban pelaksanaan berdasarkan kontrak per kontrak. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dinilai memiliki satu kewajiban pelaksanaan, Grup menerapkan metode tunggal untuk mengukur tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan metode pengukuran yang paling menggambarkan ekonomi kontrak, yang dalam banyak kasus adalah berdasarkan waktu.

Grup juga menyajikan klasifikasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan yang konsisten. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri, Grup menyajikan kewajiban pelaksanaan dalam komponen laporan keuangan yang paling mewakili layanan utama Grup, yaitu internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika.

(ii) Pertimbangan penting dalam menentukan harga jual yang berdiri sendiri

Grup menyediakan beragam produk yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri untuk barang dan/atau jasa yang tidak dapat diamati, Grup menggunakan pendekatan margin biaya ditambah biaya yang diharapkan. Grup menentukan margin yang sesuai berdasarkan data historis.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(f) Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan *goodwill*

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan *goodwill*, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

(g) Akuisisi

Grup mengevaluasi setiap transaksi akuisisi untuk menentukan akan diperlakukan sebagai akuisisi aset atau kombinasi bisnis. Untuk transaksi yang diperlakukan sebagai akuisisi aset, harga pembelian dialokasikan untuk aset yang diperoleh, tanpa pengakuan *goodwill*. Untuk akuisisi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, Grup menerapkan metode akuisisi akuntansi atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan hasil operasi disertakan dengan hasil Grup dari tanggal akuisisi masing-masing.

Setiap kelebihan dari harga pembelian dibayar atas jumlah yang diakui untuk aset yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Grup terus mengevaluasi akuisisi yang diperhitungkan sebagai kombinasi bisnis untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun setelah tanggal akuisisi yang berlaku dari setiap transaksi untuk menentukan apakah penyesuaian tambahan diperlukan untuk alokasi harga pembelian yang dibayarkan untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih biasanya ditentukan dengan menggunakan salah satu perkiraan biaya penggantian atau metode penilaian arus kas diskonto. Ketika menentukan nilai wajar dari aset berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan biaya untuk mengganti aset dengan aset baru dengan mempertimbangkan faktor seperti umur, kondisi, dan masa manfaat ekonomi dari aset. Ketika menentukan nilai wajar dari aset tidak berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan tingkat diskonto yang berlaku dan waktu dan jumlah arus kas masa depan, termasuk tingkat dan persyaratan atas perpanjangan dan pengurangan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	Mata uang	30 September 2021		31 Desember 2020	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kas	Rp	-	38	-	19
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	Rp	-	2.162	-	1.559
	US\$	79	1.134	8	110
	EUR	2	29	2	28
	JPY	1	0	1	0
	HKD	3	5	2	3
	AU\$	0	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	Rp	-	1.229	-	1.129
	US\$	4	56	5	72
	SGD	0	0	0	0
	EUR	0	0	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	Rp	-	195	-	312
	US\$	3	48	0	6
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	68	-	64
	US\$	-	-	0	0
	SGD	-	-	0	0
Sub-jumlah			<u>4.926</u>		<u>3.283</u>
Pihak ketiga					
PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	1.845	-	1.576
	US\$	8	112	0	1
	MYR	-	-	1	4
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong")	US\$	49	701	36	504
	HKD	30	55	5	10
Standard Chartered Bank ("SCB")	Rp	-	0	-	0
	US\$	16	222	6	86
	SGD	8	83	8	81
PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA")	Rp	-	85	-	66
	US\$	1	3	0	2
PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata")	Rp	-	87	-	81
	US\$	0	0	1	12
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	367	-	567
	US\$	12	169	7	106
	MYR	7	25	13	44
	SGD	2	25	1	15
	AU\$	0	2	41	5
	EUR	0	1	0	5
	TWD	30	16	42	21
Sub-jumlah			<u>3.798</u>		<u>3.186</u>
Jumlah bank			<u>8.724</u>		<u>6.469</u>
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	1.748	-	3.039
	US\$	48	693	27	385
BRI	Rp	-	1.142	-	2.421
	US\$	49	697	34	479
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	Rp	-	1.142	-	2.123
Bank Mandiri	Rp	-	493	-	2.825
	US\$	-	-	14	190
Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	Rp	-	300	-	-
Sub-jumlah			<u>6.215</u>		<u>11.462</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	30 September 2021		31 Desember 2020	
	Saldo		Saldo	
	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka (lanjutan)				
Pihak ketiga				
PT Bank Mega Tbk. ("Bank Mega")	Rp	-	563	379
	US\$	16	236	131
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. ("BJB")	Rp	-	601	919
	US\$	11	153	80
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank")	Rp	-	377	12
	US\$	7	107	494
	MYR	2	7	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	252	42
PT Bank Danamon Tbk. ("Bank Danamon")	Rp	-	150	101
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	68	410
	US\$	-	-	71
Sub-jumlah		2.514	2.639	2.639
Jumlah deposito berjangka		8.729	14.101	14.101
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian		(0)	(0)	(0)
Jumlah		17.491	20.589	20.589

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Rupiah	1,25% - 7,75%	2,00% - 8,25%
Mata uang asing	0,25% - 1,75%	0,25% - 2,80%

Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank yang sehat secara finansial karena dimiliki oleh negara.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	30 September 2021		31 Desember 2020	
	Saldo		Saldo	
	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka				
Pihak berelasi				
Bank Mandiri	Rp	-	170	-
	US\$	5	72	5
BRI	Rp	-	190	-
	US\$	-	-	14
BNI	Rp	-	20	-
	US\$	-	-	20
BTN	US\$	-	-	9
Sub jumlah		<u>452</u>		<u>1.031</u>
Pihak ketiga				
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	17	-
	US\$	5	73	5
Jumlah deposito berjangka		<u>542</u>		<u>1.120</u>
Rekening penampungan	Rp	-	19	-
	US\$	2	28	2
Jumlah rekening penampungan		<u>47</u>		<u>74</u>
Reksa dana				
Pihak berelasi				
PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW")	Rp	-	78	-
Jumlah reksa dana		<u>78</u>		<u>77</u>
Lainnya (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	0	-
	US\$	-	-	2
Jumlah lainnya		<u>0</u>		<u>32</u>
Jumlah		<u>667</u>		<u>1.303</u>

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Rupiah	2,75% - 6,50%	3,25% - 6,50%
Mata uang asing	0,11% - 0,50%	0,15% - 1,08%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*. dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
BUMN	1.580	1.564
Indonusa	440	504
Indosat	159	225
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	408	407
Jumlah	2.587	2.700
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.236)	(1.056)
Jumlah bersih	1.351	1.644

(ii) Pihak ketiga

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Pelanggan individual dan bisnis	16.326	15.095
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	1.389	1.904
Jumlah	17.715	16.999
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.793)	(7.304)
Jumlah bersih	9.922	9.695

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Sampai dengan 3 bulan	1.297	1.356
3 sampai dengan 6 bulan	216	253
Lebih dari 6 bulan	1.074	1.091
Jumlah	2.587	2.700
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.236)	(1.056)
Jumlah bersih	1.351	1.644

(ii) Pihak ketiga

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Sampai dengan 3 bulan	9.974	8.762
3 sampai dengan 6 bulan	933	1.021
Lebih dari 6 bulan	6.808	7.216
Jumlah	17.715	16.999
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.793)	(7.304)
Jumlah bersih	9.922	9.695

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha

	30 September 2021			31 Desember 2020		
	Sebelum penyisihan	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	Tingkat kerugian kredit ekspektasian	Sebelum penyisihan	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	Tingkat kerugian kredit ekspektasian
Belum jatuh tempo	8.374	656	7,8%	7.818	696	8,9%
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	2.897	417	14,4%	2.300	488	21,2%
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	1.149	326	28,4%	1.274	495	38,9%
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	7.882	7.630	96,8%	8.307	6.681	80,4%
Jumlah	20.302	9.029		19.699	8.360	

Grup telah membentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp3.555 miliar dan Rp4.217 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	30 September 2021	31 Desember 2020
Rupiah	2.586	2.690
Dolar A.S.	1	10
Jumlah	2.587	2.700
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.236)	(1.056)
Jumlah bersih	1.351	1.644

(ii) Pihak ketiga

	30 September 2021	31 Desember 2020
Rupiah	15.597	14.635
Dolar A.S.	2.056	2.265
Dolar Singapura	33	75
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	29	24
Jumlah	17.715	16.999
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.793)	(7.304)
Jumlah bersih	9.922	9.695

d. Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian

	30 September 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	8.360	6.203
Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 71	-	(14)
Akuisisi	61	-
Penyisihan yang diakui selama periode berjalan	1.029	2.362
Penghapusbukuan piutang	(421)	(191)
Saldo akhir	9.029	8.360

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, piutang usaha tertentu entitas anak masing-masing sebesar Rp2.307 miliar dan Rp3.432 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 19a dan 20c).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET KONTRAK

	30 September 2021	31 Desember 2020
Aset kontrak	1.487	1.351
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(188)	(112)
Jumlah bersih	1.299	1.239
Jangka pendek	(1.128)	(1.036)
Jangka panjang	171	203

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya aset kontrak.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

7. PERSEDIAAN

	30 September 2021	31 Desember 2020
Komponen	528	560
Kartu SIM dan voucher Prabayar	233	265
Lain-lain	126	226
Jumlah	887	1.051
Provisi atas persediaan usang		
Komponen	(29)	(37)
Kartu SIM dan voucher Prabayar	(28)	(28)
Lain-lain	(5)	(3)
Jumlah	(62)	(68)
Jumlah bersih	825	983

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	68	92
Provisi yang diakui selama periode berjalan	2	1
Penghapusbukuan persediaan	(8)	(25)
Saldo akhir	62	68

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp455 miliar dan Rp358 miliar (Catatan 26).

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, persediaan tertentu entitas anak masing-masing sebesar Rp557 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 20c).

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, modul (bagian dari aset tetap) dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp98 miliar dan Rp107 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp155 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. ASET LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka (Catatan 36c.i)	2.339	4.554
Uang muka	977	1.339
Gaji dibayar di muka	385	182
Sewa dibayar di muka	126	259
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	396	188
Jumlah	4.223	6.522

9. BIAYA KONTRAK

Rincian dari biaya kontrak adalah sebagai berikut:

	30 September 2021		
	Biaya perolehan kontrak	Biaya pemenuhan kontrak	Jumlah
Saldo, 1 Januari 2021	1.245	463	1.708
Amortisasi selama periode berjalan	(170)	(50)	(220)
Penambahan selama periode berjalan	472	356	828
Saldo, 30 September 2021	1.547	769	2.316
Jangka pendek	(252)	(404)	(656)
Jangka panjang	1.295	365	1.660

	31 Desember 2020		
	Biaya perolehan kontrak	Biaya pemenuhan kontrak	Jumlah
Saldo, 31 Desember 2019	-	-	-
Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 72	696	489	1.185
Jumlah	696	489	1.185
Saldo, 1 Januari 2020	696	489	1.185
Amortisasi selama periode berjalan	(150)	(368)	(518)
Penambahan selama periode berjalan	699	342	1.041
Saldo, 31 Desember 2020	1.245	463	1.708
Jangka pendek	(193)	(261)	(454)
Jangka panjang	1.052	202	1.254

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA INSTRUMEN KEUANGAN

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Obligasi konversi		
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ("AKAB")	-	2.116
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	429	223
Jumlah obligasi konversi	429	2.339
Investasi pada ekuitas		
AKAB	6.756	-
Lain-lain	2.896	1.706
Jumlah investasi pada ekuitas	9.652	1.706
Total	10.081	4.045

Dalam upaya mempercepat transformasi Grup menuju perusahaan telekomunikasi digital, Grup melalui anak perusahaannya, Telkomsel, memperkuat inisiatif kemitraan strategis dengan melakukan investasi di AKAB yang merupakan sebuah perusahaan aplikasi (perangkat lunak) berbasis telepon seluler dengan merek dagang Gojek, untuk memberikan manfaat baru bagi pengguna dan juga membantu mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah ("UMKM").

Pada tanggal 16 November 2020, Telkomsel telah mengadakan perjanjian untuk melakukan investasi dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga senilai US\$150 juta (setara dengan Rp2.116 miliar pada tanggal 31 Desember 2020), yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Investasi pada obligasi konversi ini diklasifikasikan sebagai FVTPL karena dimiliki oleh Telkomsel bukan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terhutang. Selain itu tersedia opsi beli saham yang memberikan hak kepada Telkomsel untuk membeli tambahan saham pada AKAB sebesar US\$300 juta dan dapat dieksekusi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif dengan harga US\$5.049 per saham.

Pada tanggal 18 Mei 2021, obligasi konversi tersebut telah dikonversi menjadi ekuitas dan opsi beli saham senilai US\$300 juta tersebut telah dieksekusi. Telkomsel menilai nilai wajar penyertaan pada AKAB sebesar US\$5.301 per saham dengan keuntungan kenaikan nilai wajar sebesar Rp350 miliar termasuk dampak selisih kurs.

Investasi pada ekuitas termasuk investasi MDI pada beberapa perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Penambahan investasi pada periode berjalan oleh MDI berjumlah sebesar Rp980 miliar. Investasi pada ekuitas ini diklasifikasikan sebagai FVTPL.

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA ENTITAS ASOSIASI

Rincian penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas untuk periode 30 September 2021:

	30 September 2021						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:							
Jalin ^a	33,00	89	-	15	-	-	104
Finarya ^b	24,33	87	-	(87)	-	-	-
Tiphone ^c	24,00	-	-	-	-	-	-
Indonusa ^d	20,00	-	-	2	-	-	2
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar) ^e		16	42	(34)	-	0	24
Jumlah penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi		192	42	(104)	-	0	130

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk periode 30 September 2021*:

	Jalin	Finarya	Indonusa	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>				
Aset lancar	307	1.928	501	843
Aset tidak lancar	221	224	313	4.344
Liabilitas jangka pendek	(199)	(1.614)	(229)	(410)
Liabilitas jangka panjang	(16)	(31)	(573)	(4.223)
Ekuitas	313	507	12	554
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>				
Pendapatan	291	95	558	862
Beban operasional	(233)	(889)	(531)	(605)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	-	26	(17)	(98)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	58	(768)	10	159
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(13)	8	(3)	(1)
Laba (rugi) periode berjalan	45	(760)	7	158
Laba (rugi) komprehensif lain	-	-	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	45	(760)	7	158

* Ringkasan informasi keuangan Tiphone pada tanggal 30 September 2021 tidak tersedia.

Rincian penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas untuk periode per 31 Desember 2020:

	31 Desember 2020							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:								
Jalin ^a	33,00	77	-	17	(5)	(0)	-	89
Finarya ^b	25,00	267	28	(209)	-	1	-	87
Tiphone ^c	24,00	526	-	(41)	-	-	(485)	-
Indonusa ^d	20,00	210	-	-	-	-	(210)	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar) ^e		130	(33)	(13)	-	(0)	(68)	16
Jumlah penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi		1.210	(5)	(246)	(5)	1	(763)	192

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk periode 31 Desember 2020*:

	Jalin	Finarya	Indonusa	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>				
Aset lancar	187	3.160	565	972
Aset tidak lancar	194	169	331	4.516
Liabilitas jangka pendek	(92)	(2.327)	(318)	(795)
Liabilitas jangka panjang	(22)	(41)	(573)	(4.398)
Ekuitas	267	961	5	295
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>				
Pendapatan	277	133	783	1.278
Beban operasional	(205)	(948)	(691)	(1.035)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(3)	69	(24)	(92)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	69	(746)	68	151
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(18)	2	(6)	(4)
Laba (rugi) periode berjalan	51	(744)	62	147
Laba (rugi) komprehensif lain	(1)	4	7	(27)
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	50	(740)	69	120

* Ringkasan informasi keuangan Tiphone pada tanggal 31 Desember 2020 tidak tersedia.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

- ^a Jalin sebelumnya adalah entitas anak. Pada tanggal 19 Juni 2019 Grup menjual 67% kepemilikan sahamnya kepada PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") senilai Rp395 miliar.
- ^b Pada tanggal 21 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya") dengan modal awal Rp25 miliar dan pada tanggal 22 Februari 2019 Telkomsel mengalihkan asetnya sebesar Rp 150 miliar. Atas akuisisi ini Telkomsel memperoleh masing-masing 2.499 dan 14.974 lembar saham (kepemilikan saham 100%). Telkomsel dengan PT Mandiri Capital Indonesia, PT BRI Ventura Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Jasamarga Tollroad Operator, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), PT Pertamina Retail, PT Kereta Commuter Indonesia ("KCI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Danareksa Capital, menandatangani perjanjian pemegang saham pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Oktober 2019, dan 31 Desember 2019 sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh masing-masing pemegang saham. Pada tanggal 31 Desember 2019, Telkomsel memiliki 48.530 lembar saham atau setara dengan 26,58% kepemilikan saham.
- Pada tanggal 23 Oktober 2020, Finarya menerbitkan 13.632 saham seri B yang dimiliki oleh Grab LA Pte Ltd ("Grab") sebesar 11.237 lembar saham, PT BRI Ventura Indonesia sebesar 943 lembar saham, PT Mandiri Capital Indonesia sebesar 924 lembar saham dan Telkomsel sebesar 528 lembar saham. Investasi ini menurunkan kepemilikan Telkomsel di Finarya menjadi 25,00%.
- Pada tanggal 8 Maret 2021, PT Dompot Karya Anak Bangsa ("DKAB") berinvestasi di Finarya yang menyebabkan kepemilikan Telkomsel turun dari 25% menjadi 24,33%. Pada tanggal 30 September 2021, nilai penyertaan Telkomsel pada Finarya telah terserap seluruhnya sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak diakui sebesar Rp99 miliar.
- ^c Tiphone berdiri pada tanggal 25 Juni 2008 dengan nama PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Tiphone bergerak di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar, termasuk di dalamnya aset tak berwujud dan *goodwill* masing-masing sebesar Rp188 miliar dan Rp647 miliar. Pada tahun 2020, Manajemen telah mengakui penurunan nilai penuh atas investasi pada Tiphone mengingat keraguan atas kelangsungan bisnis, kondisi keuangan dan penangguhan saham yang berlaku efektif 10 Juni 2020. Manajemen telah memutuskan untuk membukukan penyisihan penuh untuk investasi di Tiphone per 31 Desember 2020.
- ^d Indonusa sebelumnya adalah entitas anak. Pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat Sirkuler Pemegang Saham Indonusa yang tercakup dalam akta notaris No. 57 tanggal 23 April 2014 oleh FX Budi Santoso Isbandi, S.H., yang disetujui oleh Menkumham dalam Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, pemegang saham Indonusa menyetujui atas peningkatan jumlah saham yang diterbitkan dan dibayar penuh sejumlah Rp80 miliar. Perusahaan telah menggunakan haknya atas saham yang diterbitkan dan melakukan pengalihan ke Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33% dan kepemilikan Perusahaan atas Indonusa menjadi 15,67%. Berdasarkan penilaian manajemen, pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat penyisihan penurunan nilai investasi pada Indonusa.
- ^e Bagian kumulatif rugi atas investasi lain-lain yang tidak diakui hingga periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp200 miliar dan Rp228 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP

	1 Januari 2021	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	30 September 2021
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.800	-	7	-	(1)	1.806
Bangunan	16.137	-	18	(1)	665	16.819
Renovasi bangunan sewa	1.410	-	28	(8)	44	1.474
Peralatan sentral telepon	17.506	-	783	(99)	841	19.031
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	2.012	-	48	-	(429)	1.631
Peralatan dan instalasi transmisi	159.196	-	1.649	(3.480)	1.201	158.566
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	10.423	-	93	(10)	(1)	10.505
Jaringan kabel	60.796	-	4.605	(5)	(191)	65.205
Catu daya	20.988	-	206	(234)	787	21.747
Peralatan pengolahan data	17.663	1	121	(33)	1.476	19.228
Peralatan telekomunikasi lainnya	7.513	-	1.000	-	12	8.525
Peralatan kantor	2.125	28	106	(15)	2	2.246
Kendaraan	551	-	28	(29)	(6)	544
Peralatan lainnya	68	-	17	-	(12)	73
Aset dalam pembangunan	2.524	-	9.859	(49)	(9.641)	2.693
Jumlah	<u>320.712</u>	<u>29</u>	<u>18.568</u>	<u>(3.963)</u>	<u>(5.253)</u>	<u>330.093</u>

	1 Januari 2021	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	30 September 2021
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	4.872	-	473	(3)	13	5.355
Renovasi bangunan sewa	1.061	-	99	(6)	-	1.154
Peralatan sentral telepon	11.621	-	1.391	(100)	108	13.020
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.582	-	-	-	-	1.582
Peralatan dan instalasi transmisi	87.991	-	8.577	(3.460)	(4.015)	89.093
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	4.412	-	559	(10)	60	5.021
Jaringan kabel	15.978	-	2.020	(7)	(31)	17.960
Catu daya	14.757	-	1.167	(228)	2	15.698
Peralatan pengolahan data	12.780	-	1.240	(20)	1	14.001
Peralatan telekomunikasi lainnya	2.885	-	1.085	-	3	3.973
Peralatan kantor	1.574	-	267	(15)	(34)	1.792
Kendaraan	229	-	44	(11)	15	277
Peralatan lainnya	47	-	2	-	-	49
Jumlah	<u>159.789</u>	<u>-</u>	<u>16.924</u>	<u>(3.860)</u>	<u>(3.878)</u>	<u>168.975</u>
Nilai buku bersih	<u>160.923</u>					<u>161.118</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2019	Dampak penerapan PSAK 73	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi /Translasi	31 Desember 2020
Harga perolehan:							
Aset tetap pemilikan langsung							
Tanah	1.644	-	1.644	157	-	(1)	1.800
Bangunan	14.062	-	14.062	201	-	1.874	16.137
Renovasi bangunan sewa	1.549	-	1.549	31	(192)	22	1.410
Peralatan sentral telepon	17.348	-	17.348	956	(1.921)	1.123	17.506
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	2.258	-	2.258	429	-	(675)	2.012
Peralatan dan instalasi transmisi	151.750	-	151.750	1.050	(3.825)	10.221	159.196
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	12.344	-	12.344	236	(2)	(2.155)	10.423
Jaringan kabel	54.357	-	54.357	8.280	(68)	(1.773)	60.796
Catu daya	20.113	-	20.113	45	(311)	1.141	20.988
Peralatan pengolahan data	16.409	-	16.409	3	(703)	1.954	17.663
Peralatan telekomunikasi lainnya	5.340	-	5.340	2.157	-	16	7.513
Peralatan kantor	2.361	-	2.361	216	(354)	(98)	2.125
Kendaraan	568	-	568	48	(104)	39	551
Peralatan lainnya	123	-	123	17	-	(72)	68
Aset dalam pembangunan	2.619	-	2.619	15.610	(8)	(15.697)	2.524
Aset sewa pembiayaan							
Peralatan dan instalasi transmisi	5.500	(5.500)	-	-	-	-	-
Peralatan pengolahan data	1	(1)	-	-	-	-	-
Kendaraan	503	(503)	-	-	-	-	-
Peralatan kantor	42	(42)	-	-	-	-	-
Aset CPE	22	(22)	-	-	-	-	-
Catu daya	-	-	-	-	-	-	-
Aset PBH	89	-	89	-	-	(89)	-
Jumlah	309.002	(6.068)	302.934	29.436	(7.488)	(4.170)	320.712
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:							
Aset tetap pemilikan langsung							
Bangunan	4.113	-	4.113	739	-	20	4.872
Renovasi bangunan sewa	1.091	-	1.091	158	(188)	-	1.061
Peralatan sentral telepon	11.976	-	11.976	1.569	(1.921)	(3)	11.621
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.580	-	1.580	-	-	2	1.582
Peralatan dan instalasi transmisi	79.993	-	79.993	11.463	(3.545)	80	87.991
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	5.809	-	5.809	900	(1)	(2.296)	4.412
Jaringan kabel	14.171	-	14.171	2.509	(66)	(636)	15.978
Catu daya	13.596	-	13.596	1.512	(309)	(42)	14.757
Peralatan pengolahan data	11.977	-	11.977	1.522	(708)	(11)	12.780
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.766	-	1.766	1.120	-	(1)	2.885
Peralatan kantor	1.678	-	1.678	375	(360)	(119)	1.574
Kendaraan	210	-	210	74	(70)	15	229
Peralatan lainnya	66	-	66	2	-	(21)	47
Aset sewa pembiayaan							
Peralatan dan instalasi transmisi	3.734	(3.734)	-	-	-	-	-
Peralatan pengolahan data	1	(1)	-	-	-	-	-
Kendaraan	115	(115)	-	-	-	-	-
Peralatan kantor	44	(44)	-	-	-	-	-
Aset CPE	20	(20)	-	-	-	-	-
Catu daya	-	-	-	-	-	-	-
Aset PBH	89	-	89	-	-	(89)	-
Jumlah	152.029	(3.914)	148.115	21.943	(7.168)	(3.101)	159.789
Nilai buku bersih	156.973	-	148.115	21.943	(7.168)	(3.101)	160.923

a. Laba dari penjualan aset tetap

	2021	2020
Hasil penjualan aset tetap	516	141
Nilai buku bersih	(32)	(6)
Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	484	135

b. Lain-lain

- (i) Pada tanggal 31 Desember 2020, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2020.
- (ii) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp25 miliar dan Rp89 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 5,81% dan 2,38%-11,00% masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

- (iii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (iv) Pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp106 miliar dan Rp218 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-Lain - bersih" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp21 miliar dan Rp36 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- (v) Pada tahun 2018, umur manfaat lisensi piranti lunak radio dan peralatan pengolahan data diubah masing-masing dari 7 tahun menjadi 10 tahun dan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp266 miliar.

Pada tahun 2020, umur manfaat menara Grup yang berada di Indonesia diubah dari 20 tahun menjadi 30 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp160 miliar. Menara disajikan sebagai bagian dari peralatan dan instalasi transmisi.

- (vi) Pada tahun 2021, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp15 miliar ditukarkan dengan peralatan PT ZTE Indonesia. Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp1.061 miliar dan Rp39 miliar akan ditukarkan, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (vii) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-50 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2070. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.
- (viii) Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp167.490 miliar dan Rp159.454 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan masing-masing sebesar Rp50.070 miliar dan Rp22.886 miliar, US\$Nihil, HKD8 juta, SGD315 juta, dan MYR54 juta dan MYR39 juta dan *first loss basis* masing-masing sebesar Rp2.750 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.
- (ix) Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah masing-masing sekitar 73,69% dan 61,19% dari nilai kontrak dengan perkiraan penyelesaian masing-masing sampai dengan Februari 2025 dan Maret 2023. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (x) Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 20b.i). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp25.438 miliar dan Rp14.115 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 19a, 20c, dan 20d).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

- (xi) Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp69.020 miliar dan Rp63.656 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.
- (xii) Pada tahun 2020, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp41.984 miliar.

13. ASET HAK-GUNA

Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, bangunan, instalasi dan peralatan transmisi, catu daya, kendaraan, dan peralatan lainnya yang digunakan dalam operasinya, yang pada umumnya memiliki masa sewa antara 1 dan 33 tahun.

Grup juga memiliki sewa tertentu dengan jangka waktu dua belas bulan atau kurang dan nilai sewa bernilai rendah. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' sebagai pengecualian untuk sewa ini. Tidak ada kontrak sewa dengan pembayaran sewa variabel. Beban sewa jangka pendek dan beban sewa aset bernilai rendah untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.331 miliar dan Rp2.337 miliar (Catatan 26).

Nilai tercatat aset hak guna yang diakui dan mutasi selama periode berjalan:

	1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ translasi	30 September 2021
Harga perolehan:					
Tanah	4.863	1.140	(951)	1	5.053
Bangunan	734	229	(28)	3	938
Peralatan dan instalasi transmisi	16.072	1.412	(464)	2	17.022
Catu daya	641	26	(77)	-	590
Kendaraan	676	13	(18)	-	671
Lain-lain	29	70	(1)	-	98
Jumlah	<u>23.015</u>	<u>2.890</u>	<u>(1.539)</u>	<u>6</u>	<u>24.372</u>
Akumulasi amortisasi					
Tanah	(763)	(660)	257	(0)	(1.166)
Bangunan	(166)	(165)	27	0	(304)
Peralatan dan instalasi transmisi	(3.160)	(2.693)	382	(0)	(5.471)
Catu daya	(200)	(161)	77	-	(284)
Kendaraan	(141)	(107)	18	(0)	(230)
Lain-lain	(19)	(31)	1	(0)	(49)
Jumlah	<u>(4.449)</u>	<u>(3.817)</u>	<u>762</u>	<u>(0)</u>	<u>(7.504)</u>
Nilai buku bersih	<u>18.566</u>				<u>16.868</u>

	31 Desember 2019	Dampak penerapan PSAK 73	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ translasi	31 Desember 2020
Harga perolehan:							
Tanah	-	3.777	3.777	1.407	(322)	1	4.863
Bangunan	-	639	639	132	(8)	(29)	734
Peralatan dan instalasi transmisi	-	14.873	14.873	1.872	(674)	1	16.072
Catu daya	-	544	544	97	-	-	641
Kendaraan	-	540	540	138	(2)	-	676
Lain-lain	-	45	45	1	(1)	(16)	29
Jumlah	-	<u>20.418</u>	<u>20.418</u>	<u>3.647</u>	<u>(1.007)</u>	<u>(43)</u>	<u>23.015</u>
Akumulasi amortisasi							
Tanah	-	-	-	(812)	49	-	(763)
Bangunan	-	-	-	(193)	4	23	(166)
Peralatan dan instalasi transmisi	-	-	-	(3.687)	527	-	(3.160)
Catu daya	-	-	-	(200)	-	-	(200)
Kendaraan	-	-	-	(141)	-	-	(141)
Lain-lain	-	-	-	(20)	1	-	(19)
Jumlah	-	-	-	<u>(5.053)</u>	<u>581</u>	<u>23</u>	<u>(4.449)</u>
Nilai buku bersih	-	-	-				<u>18.566</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Nilai tercatat liabilitas sewa dan rincian mutasinya adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal	15.617	16.600
Penambahan	2.632	3.964
Pengurangan	<u>(4.115)</u>	<u>(4.947)</u>
Saldo akhir	14.134	15.617
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(5.887)</u>	<u>(5.396)</u>
Bagian jangka panjang	<u>8.247</u>	<u>10.221</u>

Jatuh tempo pembayaran liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

Tahun	<u>30 September 2021</u>
2021	6.578
2022	630
2023	3.069
2024	1.916
2025	1.376
Selanjutnya	<u>2.575</u>
Jumlah pembayaran sewa	16.144
Bunga	<u>(2.010)</u>
Nilai kini atas pembayaran sewa	14.134
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(5.887)</u>
Bagian jangka panjang	<u>8.247</u>

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 8)	1.653	1.237
Tagihan restitusi pajak - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 28b)	872	1.382
Pajak dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 28a)	601	787
Uang muka pembelian aset tetap	546	404
Beban tangguhan	523	498
Setoran jaminan	155	168
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	<u>412</u>	<u>357</u>
Jumlah	<u>4.762</u>	<u>4.833</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2021	1.428	14.688	94	1.474	17.684
Penambahan	73	1.907	3	4	1.987
Pengurangan	-	(19)	-	-	(19)
Reklasifikasi/translasi	(1)	(139)	2	(3)	(141)
Saldo, 30 September 2021	<u>1.500</u>	<u>16.437</u>	<u>99</u>	<u>1.475</u>	<u>19.511</u>
Akumulasi amortisasi:					
Saldo, 1 Januari 2021	(125)	(9.863)	(94)	(756)	(10.838)
Beban amortisasi	-	(1.266)	(4)	(127)	(1.397)
Penurunan nilai	-	-	-	-	-
Pengurangan	-	11	-	-	11
Reklasifikasi/translasi	-	(28)	-	10	(18)
Saldo, 30 September 2021	<u>(125)</u>	<u>(11.146)</u>	<u>(98)</u>	<u>(873)</u>	<u>(12.242)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.375</u>	<u>5.291</u>	<u>1</u>	<u>602</u>	<u>7.269</u>

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2020	1.432	12.480	96	1.571	15.579
Penambahan	-	2.282	3	3	2.288
Pengurangan	-	(166)	-	(74)	(240)
Reklasifikasi/translasi	(4)	92	(5)	(26)	57
Saldo, 31 Desember 2020	<u>1.428</u>	<u>14.688</u>	<u>94</u>	<u>1.474</u>	<u>17.684</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2020	(29)	(8.400)	(93)	(611)	(9.133)
Beban amortisasi	-	(1.545)	(9)	(176)	(1.730)
Penurunan nilai	(104)	-	-	-	(104)
Pengurangan	-	124	-	-	124
Reklasifikasi/translasi	8	(42)	8	31	5
Saldo, 31 Desember 2020	<u>(125)</u>	<u>(9.863)</u>	<u>(94)</u>	<u>(756)</u>	<u>(10.838)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.303</u>	<u>4.825</u>	<u>0</u>	<u>718</u>	<u>6.846</u>

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* PT Bina Data Mandiri (“BDM”) (2012), Contact Centres Australia Pty. Ltd. (2014), PT Media Nusantara Data Global (“MNDG”) (2015), Melon dan PT Griya Silkindo Drajatmoerni (“GSDm”) (2016), TSGN dan Nutech (2017), SSI, CIP, dan Telin Malaysia (2018), PST (2019), dan PT Digital Aplikasi Solusi (2021).
- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2020, *goodwill* yang mengalami penurunan nilai adalah *goodwill* yang timbul dari akuisisi Sigma, Contact Centres Australia Pty. Ltd., dan *platform Tiketapasaja.com* masing-masing sebesar Rp88 miliar, Rp14 miliar, dan Rp2 miliar.
- (iii) Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari “Penyusutan dan Amortisasi” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing 1-5 tahun.
- (iv) Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp7.646 miliar dan Rp7.077 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	720	678
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	153	250
Sub-jumlah	873	928
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	10.057	11.953
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	2.008	2.914
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan, dan Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")	687	1.204
Sub-jumlah	12.752	16.071
Jumlah	13.625	16.999

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rupiah	11.950	14.895
Dolar A.S.	1.619	2.012
Lain-lain	56	92
Jumlah	13.625	16.999

Syarat dan ketentuan atas kewajiban keuangan di atas:

1. Utang usaha tidak dikenakan bunga dan secara umum diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun.
2. Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi pihak berelasi.
3. Lihat Catatan 38b.v untuk manajemen risiko likuiditas Grup.

17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	8.222	8.455
Gaji dan tunjangan	2.586	3.399
Umum, administrasi, dan pemasaran	2.360	2.255
Beban bunga dan administrasi bank	214	156
Jumlah	13.382	14.265

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS KONTRAK

a. Liabilitas kontrak jangka pendek

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Uang muka pelanggan Mobile	4.143	5.047
Uang muka pelanggan Enterprise	2.172	1.884
Uang muka pelanggan WIB	1.065	668
Uang muka pelanggan Consumer	128	111
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	189	124
Jumlah	<u>7.697</u>	<u>7.834</u>

b. Liabilitas kontrak jangka panjang

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Uang muka pelanggan Consumer	651	588
Uang muka pelanggan WIB	397	345
Uang muka pelanggan Enterprise	65	68
Lain-lain	6	3
Jumlah	<u>1.119</u>	<u>1.004</u>

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Mata uang	<u>30 September 2021</u>		<u>31 Desember 2020</u>	
		<u>Saldo terutang</u>		<u>Saldo terutang</u>	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
Bank Mandiri	Rp	-	5.600	-	2.900
BNI	Rp	-	1.105	-	897
Sub-jumlah			<u>6.705</u>		<u>3.797</u>
Pihak ketiga					
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	Rp	-	1.567	-	2.304
	US\$	-	-	0	4
MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")	Rp	-	1.281	-	2.611
PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS")	Rp	-	568	-	573
	US\$	-	-	1	13
PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia")	Rp	-	400	-	200
SCB	Rp	-	-	-	100
Bank CIMB Niaga	Rp	-	78	-	78
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")	Rp	-	-	-	110
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	19	-	73
	US\$	-	-	5	71
Sub-jumlah			<u>3.913</u>		<u>6.137</u>
Jumlah			<u>10.618</u>		<u>9.934</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
Mandiri 2021 2020	Telkomsel	Rp	4.000	11 Mei 2022	Kuartalan	4,06%	Tidak ada
	Perusahaan, Finnnet	Rp	4.900	20 November 2021 - 28 April 2022	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 1,50% 3 bulan JIBOR + 0,60% - 1,00%	Tidak ada
BNI 2014 - 2017	GSD, Sigma ^a	Rp	325	7 November 2021 - 9 Januari 2022	Bulanan	8,50% - 9,00%	Piutang usaha, aset tetap, dan persediaan
	Infomedia ^b , Sigma ^h , Metranet, Telkom Infra	Rp	1.170	19 Desember 2021 - 6 Juni 2022	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,10% - 2,50%	Piutang usaha
HSBC 2018	Sigma ^{c,h}	Rp	600	15 Desember 2021	Bulanan	Under BLR 8,75%	Piutang usaha
	Sigma, Metra, PINS, Metranet	Rp	1.959	8 Desember 2021 - 31 Desember 2021 -	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 0,80% - 0,90% 3 bulan JIBOR + 1,00%	Tidak ada
MUFG Bank 2020 - 2021	Infomedia, Metra, GSD, Telkom Infra, Telkomsel	Rp	2.760	30 Oktober 2021 - 20 April 2022	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,50% - 0,70%	Tidak ada
Bank DBS 2017 2016	Nutech	Rp	10	13 Oktober 2021	Bulanan	9,00% - 11,00%	Tidak ada
	Sigma ^{d,e}	US\$	0,02	31 Juli 2022	Semesteran	3,25% (US\$), 10,75% (Rp)	Piutang usaha
	Telkom Infra, Infomedia	Rp	600	31 Oktober 2021 - 31 Juli 2022	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,20%	Tidak ada
UOB Indonesia 2016	Finnnet ^f	Rp	500	20 Desember 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga 2013	GSD ^h	Rp	85	18 Oktober 2021	Bulanan	10,90% - 11,50%	Piutang usaha dan aset tetap

* Disajikan dalam mata uang asal.

** Lihat Catatan 5 dan Catatan 12 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijamin.

^a Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 23 April 2019.

^b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 28 Maret 2018 dan 6 Juli 2018.

^c Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 16 Juli 2018.

^d Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Desember 2018.

^e Fasilitas dalam mata uang Dolar A.S. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang Dolar A.S. dan Rupiah.

^f Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 Desember 2020.

^g Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 18 Januari 2019.

^h Perpanjangan otomatis jika belum dilunasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Pada tanggal 9 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Citibank dengan jumlah fasilitas sebesar Rp500 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp500 miliar.

Pada tanggal 16 November 2020, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri sebesar Rp4.400 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 27 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan HSBC dengan jumlah fasilitas sebesar Rp500 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp500 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2021, Perusahaan, Metra, Infomedia, dan Telin menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank sebesar Rp400 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp30 miliar.

Pada tanggal 29 Maret 2021, Perusahaan dan Telkom Infra menandatangani perjanjian kredit dengan BNI sebesar Rp735 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp50 miliar.

Pada tanggal 23 April 2021, Perusahaan, Sigma, dan Melon menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan HSBC sebesar Rp947 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp217 miliar.

Pada tanggal 22 Juni 2021, Perusahaan, Metra, MD Media, Metranet dan Telkomsat menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan HSBC sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp251 miliar.

Pada tanggal 24 Juni 2021, Perusahaan, Infomedia, MD Media, dan Telkom Infra menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank sebesar Rp1.560 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp900 miliar.

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Perusahaan dan GSD menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank sebesar Rp900 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp719 miliar.

Pada tanggal 26 Agustus 2021, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank Permata dengan jumlah fasilitas sebesar Rp400 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, semua fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp400 miliar.

Pada tanggal 10 September 2021, Perusahaan, Infomedia, dan Telkom Infra menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank DBS sebesar Rp750 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp275 miliar.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank of China dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp1.000 miliar.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya batasan bahwa Perusahaan harus memiliki kepemilikan saham mayoritas paling sedikit 51% terhadap anak perusahaan dan mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 30 September 2021, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut untuk Sigma, Telkom Infra, dan PINS. *Waiver* dari BNI, BCA, dan BTPN diterima masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020, 29 Desember 2020, dan 7 Januari 2021.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup digunakan untuk keperluan modal kerja.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	20a	143	184
Obligasi dan wesel bayar	20b	2.199	478
Utang bank	20c	6.027	7.648
Pinjaman lainnya	20d	1.029	1.040
Jumlah		<u>9.398</u>	<u>9.350</u>

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	20a	286	384
Obligasi dan wesel bayar	20b	4.793	6.991
Utang bank	20c	27.588	20.581
Pinjaman lainnya	20d	1.685	2.605
Jumlah		<u>34.352</u>	<u>30.561</u>

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Tahun</u>				<u>Selanjutnya</u>
			<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	20a	286	63	125	98	-	-
Obligasi dan wesel bayar	20b	4.793	-	-	-	2.098	2.695
Utang bank	20c	27.588	1.402	6.923	6.152	4.930	8.181
Pinjaman lainnya	20d	1.685	121	1.052	512	-	-
Jumlah		<u>34.352</u>	<u>1.586</u>	<u>8.100</u>	<u>6.762</u>	<u>7.028</u>	<u>10.876</u>

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

<u>Kreditur</u>	<u>Mata uang</u>	<u>30 September 2021</u>		<u>31 Desember 2020</u>	
		<u>Saldo terutang</u>		<u>Saldo terutang</u>	
		<u>Mata uang asing (dalam jutaan)</u>	<u>Setara Rupiah</u>	<u>Mata uang asing (dalam jutaan)</u>	<u>Setara Rupiah</u>
Bank luar negeri	Yen	2.688	344	3.072	418
	US\$	1	14	4	59
	Rp	-	71	-	91
Jumlah			<u>429</u>		<u>568</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19b)			<u>(143)</u>		<u>(184)</u>
Bagian jangka panjang			<u>286</u>		<u>384</u>

<u>Kreditur</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Periode jadwal pembayaran</u>	<u>Pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>
Bank luar negeri	Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%
	US\$	Semesteran	Semesteran	3,85%
	Rp	Semesteran	Semesteran	7,50%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*) (lanjutan)

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- b. Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan telah memenuhi ketentuan rasio-rasio tersebut di atas.

b. Obligasi dan wesel bayar

<u>Obligasi dan wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>30 September 2021</u> <u>Saldo terutang</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>Saldo terutang</u>
Obligasi			
2015			
Seri A	Rp	2.200	2.200
Seri B	Rp	2.100	2.100
Seri C	Rp	1.200	1.200
Seri D	Rp	1.500	1.500
Wesel bayar jangka menengah (Medium term notes atau "MTN")			
MTN I Telkom Tahun 2018			
Seri C	Rp	-	296
MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018			
Seri C	Rp	-	182
Jumlah		7.000	7.478
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			
		(8)	(9)
Jumlah		6.992	7.469
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)			
		(2.199)	(478)
Bagian jangka panjang		4.793	6.991

i. Obligasi

Tahun 2015

<u>Obligasi</u>	<u>Pokok</u> <u>utang</u>	<u>Penerbit</u>	<u>Tempat</u> <u>pencatatan</u>	<u>Tanggal</u> <u>terbit</u>	<u>Jatuh</u> <u>tempo</u>	<u>Periode</u> <u>pembayaran</u> <u>bunga</u>	<u>Tingkat</u> <u>bunga per</u> <u>tahun</u>
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	7.000						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 12b.x). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

Tahun 2015 (lanjutan)

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: *broadband, backbone, metro network, regional metro junction, information technology application and support*, dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 30 September 2021, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*Triple A*).

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

(a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.

(b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.

(c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

ii. Wesel bayar

MTN I Telkom Tahun 2018

Wesel bayar	Mata uang	Pokok utang	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun	Jaminan
Seri A	Rp	262	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	7,25%	Seluruh aset
Seri B	Rp	200	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	8,00%	Seluruh aset
Seri C	Rp	296	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	8,35%	Seluruh aset
		758					

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* ("MTN") I Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 24 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp758 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Kustodian. MTN tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi reguler di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*.

Pada tanggal 30 September 2021, peringkat MTN yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*Triple A*).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

(a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.

(b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.

(c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Wesel bayar (lanjutan)

MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018

<u>Wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode imbalan</u>	<u>Cicilan imbalan per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
Seri A	Rp	264	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	19	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri B	Rp	296	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	24	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri C	Rp	182	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	15	Hak manfaat obyek Ijarah
		742				58	

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan MTN Syariah Ijarah Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 26 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan menerbitkan MTN Syariah Ijarah dengan keseluruhan nilai pokok MTN Syariah Ijarah yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp742 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Kustodian. MTN Syariah Ijarah tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi reguler di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN Syariah Ijarah tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*. Objek Ijarah dari MTN Syariah Ijarah tersebut berupa jaringan telekomunikasi di wilayah D.I. Yogyakarta yaitu jaringan kabel, peralatan teknologi informasi, dan alat-alat produksi layanan telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, peringkat MTN Syariah Ijarah yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA Sy (Triple A Syariah).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	30 September 2021		31 Desember 2020	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
Bank Mandiri	Rp	-	5.181	-	6.203
BNI	Rp	-	7.145	-	7.958
BRI	Rp	-	2.409	-	2.822
BSI	Rp	-	185	-	43
Sub-jumlah			<u>14.920</u>		<u>17.026</u>
Pihak ketiga					
BCA	Rp	-	8.727	-	3.145
Bank DBS	Rp	-	3.929	-	1.378
MUFG Bank	Rp	-	2.233	-	2.596
Bank Permata	Rp	-	1.256	-	757
HSBC	Rp	-	964	-	214
Bank Sindikasi	Rp	-	350	-	1.326
UOB Singapore	US\$	24	339	30	427
ANZ	Rp	-	308	-	374
Bank CIMB Niaga	Rp	-	145	-	307
BTPN	Rp	-	104	-	173
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	Rp	-	79	-	113
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	MYR	11	37	12	41
Sub-jumlah			<u>18.786</u>		<u>11.288</u>
Jumlah			<u>33.706</u>		<u>28.314</u>
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			<u>(91)</u>		<u>(85)</u>
			<u>33.615</u>		<u>28.229</u>
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)			<u>(6.027)</u>		<u>(7.648)</u>
Bagian jangka panjang			<u>27.588</u>		<u>20.581</u>

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Bank	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
Bank Mandiri								
2018	Balebat	Rp	25	0	2018 - 2022	Bulanan	9,00%	Piutang usaha, persediaan, dan aset tetap
2017 - 2021	Perusahaan, GSD, Mitratel	Rp	6.393	622	2018 - 2028	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,5% - 2,25%	Aset tetap
BNI								
2018	GSD	Rp	182	44	2018 - 2021	Bulanan	8,75%	Piutang usaha
2013 - 2021	Perusahaan, GSD, TLT, Sigma, Mitratel ^a	Rp	11.752	1.258	2016 - 2033	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 2,25% - 2,50%; 3 bulan JIBOR + 1,70% - 2,25%	Piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan seluruh aset
BRI								
2017 - 2019	Perusahaan, Mitratel, GSD	Rp	3.253	413	2019 - 2026	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,70% - 2,00%	Aset tetap, dan seluruh aset
BSI								
2019 - 2021	SSI, Telkomsel	Rp	210	7.5	2019 - 2024	Bulanan	3,80% - 10%	Aset tetap
BCA								
2017 - 2021	Perusahaan, Mitratel, Telkom Infra, PST	Rp	9.811	193	2017 - 2028	Kuartalan, Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,50% - 1,85%	Piutang usaha dan aset tetap

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
DBS 2017 - 2021	PINS, Mitartel, Telkomsat	Rp	4.530	149	2018 - 2028	Kuartalan, Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,50% - 1,85%	Aset tetap
MUFG Bank 2016 - 2021	Mitratel, GSD	Rp	3.600	332	2016 - 2028	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,43% - 2,35%	Aset tetap
Bank Permata 2020 2020 - 2021	Nutech Mitratel	Rp Rp	7 1.250	0 -	2020 - 2027 2021 - 2028	Bulanan Semesteran	9,25% 3 bulan JIBOR + 1,5%	Aset tetap Aset tetap
HSBC 2021	Telkomsat, Mitratel	Rp	964	-	2023 - 2028, 31 Desember 2021	Semesteran, Tahunan	3 bulan JIBOR + 1,5% 12 bulan JIBOR + 0,8%	Aset tetap
Bank Sindikasi 2015 - 2021	Perusahaan, GSD	Rp	8.000	500	2016 - 2028	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00% - 2,50%	Seluruh aset
2018	Telin	US\$	0,09	0,007	2019 - 2025	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
UOB Singapore 2018	Telin	US\$	0,049	0,009	2019 - 2024	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
ANZ 2020	GSD, PINS	Rp	440	66	2020 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,4%	Aset tetap
Bank CIMB Niaga 2017 - 2020	GSD, PINS	Rp	700	58	2018 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,425% - 1,5%	Tidak ada
BTPN 2017 - 2020	GSD, Mitratel, Telin, Admedika	Rp	489	58	2018 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,435% - 2,00%	Tidak ada
ICBC 2017	GSD	Rp	272	34	2017 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,36%	Piutang usaha dan aset tetap

* Disajikan dalam mata uang asal

** Lihat Catatan 5, Catatan 7, dan Catatan 12 untuk piutang usaha, persediaan, dan aset tetap yang dijaminan.

^a Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, di antaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 30 September 2021, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Pada tanggal 13 Maret 2015, Perusahaan dan GSD, menandatangani perjanjian kredit dengan bank sindikasi (BCA dan BNI) dengan jumlah Rp3.000 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 12 Maret 2020, Perusahaan, GSD, dan PINS menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank ANZ dengan jumlah fasilitas GSD dan PINS masing-masing sebesar Rp240 miliar dan Rp200 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan, Mitratel, Sigma, GSD, dan Telin menandatangani perjanjian kredit dengan BRI, BNI, dan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp2.005 miliar, dan Rp1.500 miliar.

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan, GSD, Metra, Mitratel, PINS, dan Telkom sat menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank, BTPN, Bank DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA, dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp400 miliar, Rp400 miliar, Rp850 miliar, Rp495 miliar, dan Rp850 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 29 Juni 2017, BCA setuju Telkom Infra menggantikan PINS selaku debitur yang dapat melakukan penarikan kredit.

Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan dan Telin menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas Perusahaan sebesar Rp775 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2018 dan 23 Mei 2019, Perusahaan dan Mitratel menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank dan BRI, dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp800 miliar dan Rp200 miliar.

Pada tanggal 15 Januari 2019, Perusahaan, Infomedia, Telin, Telkom Infra, Telkom sat, dan Sigma menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN dengan jumlah fasilitas sebesar Rp628 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang tidak digunakan dari BTPN sebesar Rp538 miliar.

Pada tanggal 19 Juni 2019, Perusahaan dan Mitratel menandatangani perjanjian dengan BNI dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.160 miliar dan Rp840 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan jumlah fasilitas sebesar Rp4.000 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan dari BCA sebesar Rp500 miliar.

Pada tanggal 16 November 2020, Perusahaan, Mitratel, dan GSD menandatangani perubahan perjanjian dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.400 miliar, Rp1.113 miliar, dan Rp200 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp136 miliar.

Pada tanggal 4 Desember 2020, Perusahaan dan Admedika menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.500. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan dari BTPN sebesar Rp1.480 miliar.

Pada tanggal 11 Desember 2020, Perusahaan, PINS, dan GSD menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp500 miliar, Rp300 miliar, dan Rp200 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp867 miliar.

Pada tanggal 18 Januari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan BRI dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, semua fasilitas belum digunakan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Pada tanggal 28 Januari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan bank sindikasi (Mandiri dan BNI) dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.500 miliar. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang belum digunakan dari Bank Sindikasi sebesar Rp4.900 miliar.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 30 September 2021, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman atas tidak terpenuhinya rasio-rasio keuangan untuk posisi keuangan, Sigma, Telkom Infra, dan GSD. *Waiver* dari BNI, HSBC, BCA, Bank Mandiri, dan ICBC masing-masing diterima pada tanggal 28 Desember 2020, 29 Desember 2020, dan 31 Desember 2020.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha.

d. Pinjaman lainnya

Kreditur	Mata uang	Saldo terutang	
		30 September 2021	31 Desember 2020
PT Sarana Multi Infrastruktur	Rp	2.719	3.652
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(5)	(7)
Jumlah		2.714	3.645
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)		(1.029)	(1.040)
Bagian jangka panjang		1.685	2.605

Informasi lain yang signifikan terkait pinjaman lainnya pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)	Jadwal pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
PT Sarana Multi Infrastruktur							
14 November 2018	Perusahaan	Rp	1.000	110	Semesteran (2019 - 2023)	3 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
15 Juni 2020	Perusahaan	Rp	2.836	700	Kuartalan (2020 - 2024)	3 bulan JIBOR + 1,7%	Tidak ada
12 Oktober 2016	Mitratel	Rp	700	100	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR + 1,85%	Aset tetap
15 Juni 2020	Telkomsat	Rp	164	24	Semesteran (2020-2024)	3 bulan JIBOR + 1,7%	Tidak ada

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan, Mitratel, dan Telkomsat diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1, kecuali Mitratel tidak lebih dari 5:1
- (b) *Net Debt to EBITDA* tidak lebih dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal 125%, kecuali Mitratel minimal 100%

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan, Mitratel, dan Telkomsat telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Pada tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan, Telkomsat, dan Telkom Infra menandatangani amandemen perjanjian kredit dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.836 miliar, Rp164 miliar, dan RpNihil. Pada tanggal 30 September 2021, fasilitas yang tidak digunakan dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp106 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	13.576	17.879
GSD	227	232
Metra	186	135
Lainnya	104	116
Jumlah	<u>14.093</u>	<u>18.362</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) periode berjalan entitas anak:		
Telkomsel	6.801	6.292
GSD	(7)	(10)
Metra	7	(9)
Lainnya	(10)	(1)
Jumlah	<u>6.791</u>	<u>6.272</u>

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel sebesar 35% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel di bawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Aset lancar	10.717	19.488
Aset tidak lancar	83.931	84.164
Liabilitas jangka pendek	(29.255)	(28.997)
Liabilitas jangka panjang	(26.612)	(23.568)
Jumlah ekuitas	<u>38.781</u>	<u>51.087</u>
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	25.205	33.208
Kepentingan nonpengendali	13.576	17.879

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pendapatan	65.148	65.134
Beban operasi	(42.345)	(41.109)
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	1.624	(1.014)
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>24.427</u>	<u>23.011</u>
Beban pajak penghasilan – bersih	(5.004)	(4.995)
Laba periode berjalan dari operasi yang masih berlanjut	<u>19.423</u>	<u>18.016</u>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain – bersih	-	-
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	<u>19.423</u>	<u>18.016</u>
Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	6.801	6.292
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	11.104	7.725

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Ringkasan laporan arus kas

	2021	2020
Kegiatan operasi	32.512	35.164
Kegiatan investasi	(9.432)	(7.691)
Kegiatan pendanaan	(29.147)	(29.069)
Penurunan bersih kas dan setara kas	(6.067)	(1.596)

22. MODAL SAHAM

Keterangan	30 September 2021		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.761.959.180	4,81	238
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Budi Setyawan Wijaya	275.000	0	0
Afriwandi	42.500	0	0
Herlan Wijanarko	42.500	0	0
Heri Supriadi	40.000	0	0
Edi Witjara	32.500	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	42.696.314.405	43,10	2.135
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

Keterangan	31 Desember 2020		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham Seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	3.839.380.280	3,88	192
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Budi Setyawan Wijaya	275.000	0	0
Dian Rachmawan	120.222	0	0
Afriwandi	42.500	0	0
Herlan Wijanarko	42.500	0	0
Edi Witjara	32.500	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	43.618.813.083	44,03	2.181
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

23. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	30 September 2021	31 Desember 2020
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	619	583
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	5	5
Selisih transaksi akuisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(709)	(637)
Komponen ekuitas lainnya	37	37
Jumlah	338	374

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN

2021	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon	11.283	773	497	203	-	12.756
Pendapatan Interkoneksi	292	-	-	5.456	-	5.748
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	47.860	-	-	-	-	47.860
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	1	5.691	1.504	-	7.196
SMS	3.190	-	39	-	-	3.229
Lain-lain	-	-	1.177	574	209	1.960
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	51.050	1	6.907	2.078	209	60.245
Pendapatan jaringan	3	-	821	569	-	1.393
Pendapatan Indihome	-	17.715	1.923	-	-	19.638
Layanan lainnya						
Manage service dan terminal	-	-	1.431	1	-	1.432
Call center service	-	-	689	50	-	739
E-health	-	-	458	-	-	458
E-payment	-	-	342	-	22	364
Lain-lain	-	42	742	309	343	1.436
Jumlah layanan lainnya	-	42	3.662	360	365	4.429
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	62.628	18.531	13.810	8.666	574	104.209
Pendapatan dari transaksi lessor	-	-	-	1.834	-	1.834
Jumlah pendapatan	62.628	18.531	13.810	10.500	574	106.043
Penyesuaian dan eliminasi	-	8	6	2	(340)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	62.628	18.539	13.816	10.502	234	-

2020	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon	13.448	817	652	222	-	15.139
Pendapatan Interkoneksi	326	-	-	5.704	-	6.030
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	45.364	-	-	-	-	45.364
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	5	4.892	1.204	-	6.101
SMS	3.463	-	343	-	-	3.806
Lain-lain	-	-	554	452	176	1.182
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	48.827	5	5.789	1.656	176	56.453
Pendapatan jaringan	4	-	379	693	-	1.076
Pendapatan Indihome	-	14.334	1.779	-	-	16.113
Layanan lainnya						
Manage service dan terminal	-	-	714	-	-	714
Call center service	-	-	557	53	-	610
E-health	-	-	408	-	-	408
E-payment	-	-	345	-	17	362
Lain-lain	-	32	840	304	257	1.433
Jumlah layanan lainnya	-	32	2.864	357	274	3.527
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	62.605	15.188	11.463	8.632	450	98.338
Pendapatan dari transaksi lessor	-	-	-	1.603	-	1.603
Jumlah pendapatan	62.605	15.188	11.463	10.235	450	99.941
Penyesuaian dan eliminasi	(2)	18	2	(2)	(296)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	62.603	15.206	11.465	10.223	154	-

Manajemen mengharapkan bahwa sebagian besar transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 30 September 2021 akan diakui sebagai pendapatan selama periode-periode pelaporan berikutnya. Kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi pada tanggal 30 September 2021, bagian yang diharapkan dapat direalisasi dalam satu tahun adalah sebesar Rp7.937 miliar dan bagian yang lebih dari satu tahun adalah sebesar Rp5.880 miliar.

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa yang tidak dapat dibatalkan sebagai lessor. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan. Sewa ini memiliki jangka waktu antara 1 hingga 10 tahun. Semua sewa termasuk klausul untuk memungkinkan revisi atas biaya sewa setiap tahun sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Penyewa juga diharuskan untuk memberikan jaminan nilai residu pada properti yang disewa.

Tidak ada pendapatan dari pelanggan utama yang melebihi 10% dari total pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Gaji dan tunjangan	6.455	6.215
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	2.975	2.831
Beban pensiun berkala, bersih (Catatan 31)	1.073	849
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih (Catatan 31)	235	214
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 32)	129	128
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Catatan 31)	104	107
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 31)	18	18
Beban imbalan tunjangan masa kerja (Catatan 31)	3	-
Lain-lain	26	44
Jumlah	11.018	10.406

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

26. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Operasi dan pemeliharaan	15.121	14.122
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 36c.i)	4.499	4.397
Sewa sirkit dan CPE (Catatan 13)	3.106	2.049
Beban hak penyelenggaraan dan KPU	1.868	1.749
Listrik, gas, dan air	811	782
Manajemen proyek	462	333
Beban pokok penjualan kartu SIM dan voucher (Catatan 7)	431	348
Asuransi	334	254
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung (Catatan 13)	225	272
Beban pokok penjualan periferal (Catatan 7)	24	10
Sewa menara (Catatan 13)	-	16
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	97	766
Jumlah	26.978	25.098

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Beban umum	1.359	1.172
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	1.105	1.235
Jasa profesional	469	620
Perjalanan	215	197
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	178	226
Sumbangan sosial	153	163
Beban penagihan	153	136
Rapat	151	130
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	251	355
Jumlah	4.034	4.234

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perusahaan:		
PPh		
PPh Badan	-	363
Pasal 22 - Pembelian barang	-	2
Pasal 23 - Penyerahan jasa	-	124
PPN	601	787
Entitas anak:		
PPh		
PPh Badan	48	420
Pasal 4 (2) - Pajak final	275	6
Pasal 22 - Pembelian barang	9	-
Pasal 23 - Penyerahan jasa	187	-
PPN	2.202	2.255
Jumlah pajak dibayar di muka	<u>3.322</u>	<u>3.957</u>
Bagian jangka pendek	(2.721)	(3.170)
Bagian jangka panjang (Catatan 14)	<u>601</u>	<u>787</u>

b. Tagihan restitusi pajak

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perusahaan:		
PPh Badan	39	102
PPN	397	428
Entitas anak:		
PPh		
PPh Badan	605	933
Pasal 23 - Penyerahan jasa	17	17
PPN	465	756
Jumlah tagihan restitusi pajak	<u>1.523</u>	<u>2.236</u>
Bagian jangka pendek	(651)	(854)
Bagian jangka panjang (Catatan 14)	<u>872</u>	<u>1.382</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	35	53
Pasal 21 - PPh pribadi	49	119
Pasal 22 - Pembelian barang	3	5
Pasal 23 - Penyerahan jasa	15	21
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	78	-
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	3	7
Pasal 29 - PPh Badan	826	814
PPN	783	-
PPN atas Pemungutan Pajak ("WAPU")	250	490
	<u>2.042</u>	<u>1.509</u>
Entitas anak:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	173	136
Pasal 21 - PPh pribadi	98	176
Pasal 22 - Pembelian barang	3	4
Pasal 23 - Penyerahan jasa	46	55
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	555	3
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	18	7
Pasal 29 - PPh Badan	783	474
PPN	966	349
	<u>2.642</u>	<u>1.204</u>
Jumlah utang pajak	<u>4.684</u>	<u>2.713</u>

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kini		
Perusahaan	2.014	1.311
Entitas anak	5.525	6.067
	<u>7.539</u>	<u>7.378</u>
Tanggungan		
Perusahaan	(3)	77
Entitas anak	61	(652)
	<u>58</u>	<u>(575)</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>7.597</u>	<u>6.803</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	33.260	29.754
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	24.422	16.776
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	57.682	46.530
Dikurangi: laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(33.122)	(29.042)
Laba sebelum pajak penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan atas pajak final - Perusahaan	24.560	17.488
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(277)	(325)
Laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangi penghasilan atas pajak final - Perusahaan	24.283	17.163

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Perbedaan temporer:		
Provisi penurunan nilai piutang	559	733
Provisi imbalan karyawan	(46)	(38)
Pendapatan instalasi tanggungan	80	206
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(614)	(400)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	44	(158)
Sewa pembiayaan	8	1
Penyisihan lain-lain	90	56
Jumlah perbedaan temporer bersih	<u>121</u>	<u>400</u>
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala – bersih	235	214
Imbalan karyawan	142	125
Sumbangan	177	155
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(14.686)	(11.434)
Lain-lain	183	57
Jumlah perbedaan tetap bersih	<u>(13.949)</u>	<u>(10.883)</u>
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	<u>10.455</u>	<u>6.680</u>
Beban pajak penghasilan kini	1.986	1.269
Beban pajak penghasilan final	28	42
Jumlah beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	<u>2.014</u>	<u>1.311</u>
Beban pajak penghasilan kini - entitas anak	5.525	6.067
Jumlah beban pajak penghasilan kini	<u>7.539</u>	<u>7.378</u>

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 19% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	33.260	29.754
Dikurangi: pendapatan yang dikenakan pajak final bersih konsolidasian	(2.607)	(1.888)
	<u>30.653</u>	<u>27.866</u>
Beban pajak penghasilan dihitung pada tarif Perusahaan	5.824	5.295
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	743	643
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	68	529
Beban pajak penghasilan final	24	42
Pajak tanggungan yang tidak diakui	-	44
Lain-lain	938	250
Beban pajak penghasilan bersih	<u>7.597</u>	<u>6.803</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2/2020, yang antara lain mengatur penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% untuk tahun pajak 2022. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan PP No. 30/2020 tentang Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang mengatur pemberian tarif pajak sebesar 3% lebih rendah untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal, dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria yang telah dipersyaratkan, sehingga untuk perhitungan beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 3%.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 19% untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 22% untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perusahaan akan menyampaikan perhitungan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini di atas dalam SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun fiskal 2021 kepada Otoritas Pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

- e. Pemeriksaan pajak

- (i) Perusahaan

PPH dan PPN Tahun 2012

Pada tanggal 3 Mei 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2012. Pada tanggal 3 November 2016, Otoritas Pajak menerbitkan SKPKB PPh Badan senilai Rp991,6 miliar (termasuk denda Rp321,6 miliar), SKPKB PPN senilai Rp467 miliar (termasuk denda Rp153,5 miliar), SKPKB PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak ("JKP") dari Luar Daerah Pabean senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta), SKPKB PPN WAPU senilai Rp57 miliar (termasuk denda Rp18,5 miliar), tagihan pajak PPN senilai Rp37,5 miliar, SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp16,2 miliar (termasuk denda Rp5,3 miliar), SKPKB PPh Final Pasal 21 senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp407 juta), SKPKB PPh Pasal 23 senilai Rp63,5 miliar (termasuk denda Rp20,6 miliar), SKPKB PPh Pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), dan SKPKB PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64 miliar). Perusahaan telah menyetujui senilai Rp35,2 miliar terkait perhitungan kembali pengkreditan pajak masukan atas penyelenggaraan jasa interkoneksi *international incoming call*, Rp613,3 juta atas Pajak Penghasilan, dan Rp311,5 juta atas PPh Pasal 26 dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2016. Pada tanggal 16 November 2016, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 1 Maret 2017 dan 9 Mei 2017, Perusahaan menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN Jasa Luar Negeri senilai Rp1,8 juta (termasuk denda Rp0,6 juta) dan kurang bayar PPN WAPU senilai Rp4,4 miliar (termasuk denda Rp1,4 miliar). Atas keputusan keberatan tersebut, Perusahaan menyetujui keputusan tersebut. Pada tanggal 19 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Perusahaan dimana Otoritas Pajak telah mengurangi kurang bayar atas PPh Badan dan menambah kurang bayar atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 26 dengan rincian kurang bayar Pajak Pasal 21 senilai Rp20,7 miliar (termasuk denda Rp6,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 21 Final senilai Rp23,8 miliar (termasuk denda Rp7,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 23 senilai Rp115,7 miliar (termasuk denda Rp37,5 miliar), kurang bayar PPh Pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64,1 miliar), dan kurang bayar PPh Badan senilai Rp496,4 miliar (termasuk denda Rp161 miliar). Pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017, Otoritas pajak menerbitkan surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan untuk PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2012 dimana DJP telah menambahkan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Perusahaan secara keseluruhan untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2012 senilai Rp429,3 miliar (termasuk denda Rp141,2 miliar).

Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 17 dan 26 Januari 2018, Perusahaan mengajukan banding dan telah menempuh serangkaian sidang banding. Pada bulan September 2018, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan (pembetulan) atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan, dimana Otoritas Pajak telah mengurangi jumlah kurang bayar atas PPN untuk masa pajak Maret, April, September, dan Desember 2012 senilai Rp9,9 miliar (termasuk denda Rp3,2 miliar). Sehingga, sampai dengan 31 Desember 2018, kurang bayar atas PPN untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2012 senilai Rp419,4 miliar (termasuk denda Rp138 miliar).

Pada tanggal 16 Desember 2019, Perusahaan menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas sengketa pajak atas semua jenis pajak tahun 2012. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan terkait pajak penghasilan sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk PPh Pasal 21 senilai Rp52,4 juta (termasuk denda Rp17 juta), PPh Pasal 23 senilai Rp1,4 miliar (termasuk denda Rp0,4 miliar), PPh Pasal 26 senilai Rp802,6 juta (termasuk denda Rp260,3 juta), dan PPh Pasal 4 (2) senilai Rp1,3 juta (termasuk denda Rp0,4 juta). Untuk permohonan banding atas PPh Pasal 21 Final, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan Perusahaan. jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk PPh Badan senilai Rp29,6 miliar (termasuk denda Rp9,6 miliar) dan PPN senilai Rp51,1 miliar (termasuk denda Rp17,5 miliar).

Selanjutnya, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding terkait PPh Badan dan PPN yang diajukan Perusahaan, sehingga Perusahaan telah menerima seluruh Salinan Putusan Banding tersebut di atas dan setuju untuk membayar kurang bayar atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Badan, dan PPN.

Pada bulan Februari 2020, Perusahaan menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas PPN Masa Desember 2012 senilai Rp115,7 miliar, dimana senilai Rp46,8 miliar dikompensasikan ke SKPKB PPN masa Januari s.d. November 2012.

Pada bulan April 2020, Perusahaan mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas PPN Masa Januari s.d. Desember 2012. Perusahaan mengajukan permohonan pengurangan STP dengan melakukan perhitungan ulang berdasarkan hasil Putusan Banding, sehingga nilai STP yang semula Rp37,5 miliar menjadi Rp5,8 miliar. Pada bulan Juni 2020, Perusahaan menerima keputusan atas permohonan tersebut. Pada bulan Juli 2020, Perusahaan menerima realisasi pengembalian tersebut senilai Rp31,7 miliar, namun sejumlah Rp20,9 juta dikompensasikan ke utang pajak STP PPh Pasal 21 yang diterbitkan oleh beberapa Kantor Pelayanan Pajak Cabang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 6 Juli 2020, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali untuk seluruh Putusan Banding atas seluruh sengketa pajak tahun 2012. Pada tanggal 30 Juli 2020, Perusahaan telah merespon dengan mengirimkan Kontra Memori Peninjauan Kembali untuk seluruh sengketa pajak tahun 2012.

Sampai dengan bulan Desember 2020, Mahkamah Agung telah mengumumkan hasil putusan atas proses peninjauan kembali terhadap seluruh sengketa PPh *Withholding Tax*, PPh Badan dan sebagian sengketa PPN atas masa pajak Januari s.d. Desember 2012 kecuali masa pajak Januari, Maret, Mei dan Oktober 2012. Dalam hasil putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak seluruh peninjauan kembali yang diajukan oleh DJP kecuali atas sengketa PPh Pasal 21 diberikan putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pada bulan Februari dan Maret 2021, Perusahaan telah menerima hasil putusan atas proses peninjauan kembali terhadap sengketa PPN atas masa pajak Maret dan Oktober 2012.

Pada bulan April 2021, Perusahaan telah menerima dan melakukan pembayaran atas STP pelaksanaan hasil putusan banding dengan jumlah sanksi administrasi yang harus dibayar untuk PPh Pasal 21 senilai Rp52,4 juta, PPh Pasal 23 senilai Rp1,4 miliar, PPh Pasal 26 senilai Rp491,1 juta, PPh Final senilai Rp1,3 juta, PPh Badan senilai Rp29,0 miliar dan PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2012 senilai Rp46,8 miliar.

Dalam periode penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, Mahkamah Agung kembali mengumumkan hasil putusan berupa penolakan permohonan peninjauan kembali terhadap sengketa PPN Masa Januari dan Mei 2012 yang diajukan oleh DJP. Dengan demikian sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2015.

Pada tanggal 25 April 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan senilai Rp147 miliar, SKPKB PPN senilai Rp13 miliar (termasuk denda Rp4,1 miliar), SKPKB PPN WAPU senilai Rp6 miliar (termasuk denda Rp1,5 miliar), dan SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55,3 miliar (termasuk denda Rp16,8 miliar). Perusahaan juga menerima STP atas PPN senilai Rp34 miliar, PPN WAPU senilai Rp7 miliar, dan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp8 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPh dan PPN Tahun 2015 (lanjutan)

Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan senilai Rp17 miliar atas PPh Badan, mengalihkan perhitungan pajak atas realisasi ganti rugi migrasi Flexi senilai Rp42 miliar yang sebelumnya dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015 ke SPT PPh Badan tahun 2016.

Perusahaan juga menerima ketetapan kurang bayar PPN, kurang bayar PPN WAPU, serta STP PPN WAPU senilai Rp26 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017. Pada tanggal 24 Juli 2017, Perusahaan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas SKPLB PPh Badan dengan keberatan senilai Rp210,5 miliar dan PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar.

Pada tanggal 3 dan 22 Mei 2018, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp54,6 miliar dan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Perusahaan. Perusahaan telah menyetujui hasil proses keberatan dari Otoritas Pajak atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp793 juta dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada tanggal 18 Juli 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menambah jumlah pajak yang masih harus diterima senilai Rp76 miliar. Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan mengajukan banding.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Perusahaan menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi tambahan lebih bayar PPh Badan hasil putusan banding senilai Rp90,9 miliar.

Pada tanggal 26 Oktober 2020, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Banding atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan masih belum menerima hasil Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali DJP tersebut. Dengan demikian untuk seluruh kewajiban pajak tahun 2015 selain jenis pajak PPh Badan dapat dianggap final dan berkekuatan hukum tetap karena pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini kewajiban pajak tahun 2015 tersebut telah melewati masa daluwarsa penetapan pajak sebagaimana ketentuan perundangan-undangan perpajakan.

PPh dan PPN Tahun 2016

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2016.

Pada tanggal 7 Juni 2018, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp15,3 miliar, SKPKB PPh Pasal 26 senilai Rp556,7 juta (termasuk denda Rp180,5 juta) dan SKPLB PPN senilai Rp922,7 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan atas PPh Badan senilai Rp15,3 miliar dan saldo tersisa senilai Rp99,1 miliar telah dibebankan sebagai pajak kini atas pemeriksaan pajak, kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp557 juta, kredit pajak PPN senilai Rp10,5 miliar, STP PPN WAPU senilai Rp7,1 miliar, PPN atas pemberian cuma-cuma senilai Rp7,3 miliar, PPN atas pengalihan aset senilai Rp1,2 miliar, dan STP PPN senilai Rp1,7 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada bulan Juli 2018, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp882,7 miliar dan untuk sisa saldo senilai Rp39,9 miliar telah dikompensasikan ke STP PPN senilai Rp31,9 miliar, PPN WAPU senilai Rp7,1 miliar, PPh Pasal 23 senilai Rp556 juta, dan PPh Pasal 21 senilai Rp300 juta. Atas surat ketetapan tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2018, Perusahaan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terkait interkoneksi *international incoming call* senilai Rp151,7 miliar dan STP PPN senilai Rp30,3 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPh dan PPN Tahun 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 11 Maret dan 27 Mei 2019, Otoritas Pajak menerbitkan surat putusan atas keberatan Perusahaan, dimana Otoritas Pajak mengabulkan semua keberatan Perusahaan dan menambah jumlah kelebihan bayar untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2016. Pada bulan April dan Juli 2019, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp151,7 miliar dan senilai Rp1,9 juta telah dikompensasikan ke PPh Pasal 21 untuk beberapa masa pajak. Dengan demikian untuk seluruh kewajiban pajak tahun 2016 telah dianggap final dan berkekuatan hukum tetap.

PPh dan PPN tahun 2018

Pada tanggal 17 Februari 2020, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2018. Pada tanggal 25 Februari 2020, Perusahaan telah menerima pengembalian pendahuluan atas restitusi PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018 senilai Rp979,1 miliar dan senilai Rp30,3 miliar dikompensasikan ke SKPKB PPh Badan dan pajak penghasilan tahun pajak 2012. Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menerima SKP dan STP atas hasil pemeriksaan *all taxes* tahun 2018. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp101,5 miliar, SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp1,9 miliar (termasuk denda Rp573,9 juta), SKPKB PPh Pasal 23 senilai Rp4 juta (termasuk denda Rp1,2 juta) dan SKPLB PPN Masa Januari s.d. Agustus dan Oktober s.d. Desember senilai Rp85,3 miliar. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan SKPKB PPN Masa September senilai Rp240,5 miliar (termasuk denda Rp59,5 miliar), SKPKB PPN WAPU senilai Rp15,17 miliar (termasuk denda Rp4,6 miliar) dan STP PPN WAPU senilai Rp1,2 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima koreksi pajak pemeriksa atas PPh Badan senilai Rp1,1 miliar, kurang bayar PPh Pasal 21 senilai Rp1,9 miliar, kurang bayar PPh 23 senilai Rp4 juta, kredit pajak PPN senilai Rp4,8 miliar, STP PPN WAPU senilai Rp1,2 miliar, kurang bayar PPN WAPU senilai Rp15,17 miliar. Koreksi yang telah disetujui telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2020.

Perusahaan tidak menyetujui koreksi pemeriksa pajak yang mengenakan PPN atas transaksi penyerahan komponen *space segment* aset dalam konstruktif (ADK) Satelit Merah Putih kepada TelkomSAT. Pada bulan Maret 2021, Perusahaan telah mengajukan surat keberatan pajak ke Otoritas Pajak atas koreksi pemeriksa pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses keberatan pajak masih berlangsung dan Perusahaan telah menerima seluruh pengembalian kelebihan pajak atas PPh Badan dan PPN pada bulan Januari dan Februari 2021.

(ii) TelkomSEL

PPh dan PPN Tahun 2011

Pada tanggal 15 Februari 2016, TelkomSEL mengajukan banding kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPh Badan senilai Rp250 miliar (termasuk denda Rp81,1 miliar). Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2016, TelkomSEL juga mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPN senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta).

Pada tanggal 6 Februari 2017, TelkomSEL menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas PPN senilai Rp1,2 miliar yang mendukung TelkomSEL. Selanjutnya, TelkomSEL menerima restitusi pajak di bulan Maret dan Juni 2017. Pada tanggal 2 Maret 2017, TelkomSEL menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPh Badan yang menerima sebagian dari banding TelkomSEL senilai Rp247,6 miliar dan mencatatnya sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 31 Agustus 2017, TelkomSEL menerima restitusi pajak. Di bulan Juli dan Oktober 2017, TelkomSEL menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali atas kurang bayar PPh Badan dan PPN masing-masing senilai Rp62 miliar dan Rp1,2 miliar. Atas hal ini, TelkomSEL mengajukan kontra memori peninjauan kembali di bulan Agustus dan November 2017. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, TelkomSEL telah menerima putusan dari Mahkamah Agung secara parsial, dimana Mahkamah Agung menolak permintaan Otoritas Pajak berkaitan dengan PPN senilai Rp1,1 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

PPh dan PPN Tahun 2011 (lanjutan)

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Telkomsel telah mengajukan surat kepada Pengadilan Pajak untuk meminta sisa putusan resmi terkait PPN tahun 2011 yang telah diumumkan oleh Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Telkomsel.

Pada bulan Oktober 2019, Telkomsel telah menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung yang menolak permintaan Otoritas Pajak atas PPh Badan senilai Rp62 miliar. Pada tanggal 24 Januari 2020, Telkomsel telah menerima sisa putusan dari Mahkamah Agung yang menolak permintaan Otoritas Pajak terkait PPN tahun 2011 sebesar Rp0,1 miliar.

PPh dan PPN Tahun 2014

Pada tanggal 31 Mei 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2014 senilai Rp150,6 miliar (termasuk denda Rp54,6 miliar). Telkomsel menerima atas bagian senilai Rp16,5 miliar dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Juni 2019 dan dicatat sebagai beban lain-lain. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Telkomsel telah membayar sebesar Rp99,1 miliar dan mencatat sebagai tagihan restitusi pajak. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp134,1 miliar.

Pada tanggal 15 Juli dan 22 Juli 2020, Telkomsel menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menerima sebesar Rp27,2 miliar dan menolak keberatan sebesar Rp106,8 miliar. Pada tanggal 27 Agustus 2020, Telkomsel menerima sebagian restitusi pajak sebesar Rp27,2 miliar.

Pada tanggal 28 September 2020, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN tahun 2014. Sampai dengan tanggal persetujuan dan otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding masih dalam proses.

PPh dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2015 senilai Rp384,8 miliar (termasuk denda Rp128,6 miliar) dan telah dibayar penuh pada tanggal 28 Agustus 2019. Atas nilai tagihan sebesar Rp34,6 miliar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dan saldo tersisa senilai Rp350,2 miliar dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 24 September 2019, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp350,2 miliar.

Pada tanggal 13 Juli 2020, Telkomsel menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menolak semua keberatan Perusahaan.

Pada tanggal 28 September 2020, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN tahun 2015. Sampai dengan tanggal persetujuan dan otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding masih dalam proses.

PPh dan PPN Tahun 2018

Pada tanggal 20 Februari 2020, Telkomsel menerima surat perintah pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2018. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	(Dibebankan) Dikreditkan ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dibebankan ke ekuitas dan reklasifikasi	30 September 2021
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi penurunan nilai piutang	824	92	-	-	916
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala-bersih	1.204	(12)	-	-	1.192
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	414	(73)	-	-	341
Provisi imbalan karyawan	277	(31)	-	-	246
Pendapatan instalasi tangguhan	119	12	-	-	131
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	23	(1)	-	-	22
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	72	(1)	-	-	71
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.933</u>	<u>(14)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.919</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Penilaian investasi jangka panjang	-	-	-	-	-
Sewa pembiayaan	(3)	2	-	-	(1)
Kapitalisasi biaya kontrak	(90)	15	-	-	(75)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(93)</u>	<u>17</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(76)</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	1.079	49	-	-	1.128
Provisi penurunan nilai piutang	282	22	-	-	304
Liabilitas kontrak	-	-	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	575	(129)	-	-	446
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>1.936</u>	<u>(58)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.878</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	1	-	-	-	1
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.523)	14	-	-	(1.509)
Amortisasi lisensi	(124)	(14)	-	-	(138)
Biaya kontrak	-	-	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	(70)	(8)	-	-	(78)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.716)</u>	<u>(8)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.724)</u>
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	2.840	3	-	-	2.843
Aset pajak tangguhan Telkomsel - bersih	220	(66)	-	-	154
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	518	60	-	-	578
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(561)	(54)	-	5	(610)
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>3.578</u>	<u>(3)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.575</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(561)</u>	<u>(54)</u>	<u>-</u>	<u>5</u>	<u>(610)</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2019	Dampak penerapan standar baru	Perubahan tarif pajak	(Dibebankan) Dikreditkan ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dibebankan ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Desember 2020
Perusahaan							
Aset pajak tangguhan:							
Provisi penurunan nilai piutang	760	16	(126)	174	-	-	824
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala-bersih	837	-	(158)	(21)	546	-	1.204
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	427	-	32	(45)	-	-	414
Provisi imbalan karyawan	230	-	(12)	59	-	-	277
Pendapatan instalasi tangguhan	92	-	(17)	44	-	-	119
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	19	-	(1)	5	-	-	23
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	75	-	(8)	5	-	-	72
Jumlah aset pajak tangguhan	2.440	16	(290)	221	546	-	2.933
Liabilitas pajak tangguhan:							
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	1	10	-	-	-
Sewa pembiayaan	(5)	-	1	1	-	-	(3)
Kapitalisasi biaya kontrak	-	(135)	15	30	-	-	(90)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(16)	(135)	17	41	-	-	(93)
Telkomsel							
Aset pajak tangguhan:							
Provisi imbalan karyawan	865	-	(186)	102	298	-	1.079
Provisi penurunan nilai piutang	259	44	(59)	38	-	-	282
Liabilitas kontrak	-	9	(1)	(8)	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	-	191	(109)	493	-	-	575
Jumlah aset pajak tangguhan	1.124	244	(355)	625	298	-	1.936
Liabilitas pajak tangguhan:							
Sewa pembiayaan	(1.099)	1.100	-	-	-	-	1
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(557)	(1.290)	446	(122)	-	-	(1.523)
Amortisasi lisensi	(151)	-	31	(4)	-	-	(124)
Biaya kontrak	-	(27)	3	24	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	-	(5)	-	(65)	-	-	(70)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.807)	(222)	480	(167)	-	-	(1.716)
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	2.424	(119)	(273)	262	546	-	2.840
Aset / (liabilitas) pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(683)	22	125	458	298	-	220
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	474	(2)	(57)	102	4	(3)	518
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(547)	7	(6)	(26)	11	-	(561)
Aset pajak tangguhan - bersih	2.215	(99)	(205)	822	848	(3)	3.578
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(547)	7	(6)	(26)	11	-	(561)

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar 24.744 miliar dan Rp32.550 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat terealisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

g. Administrasi

Sejak tahun 2008 s.d. 2019, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015, serta PMK No. 238/PMK.03/2008. Selanjutnya Perusahaan juga berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 3% karena memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No.30/2020. Berdasarkan hal tersebut untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 19%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi (lanjutan)

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan dan entitas anaknya dalam negeri menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK No. 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 34/PMK.010/2017 tanggal 1 Maret 2017. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM serta PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah melalui Keputusan DJP No.KEP-00080/WPJ.19/KP.04/2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 tanggal 12 April 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 117/PMK.03/2019 tanggal 6 Agustus 2019, maka Perusahaan dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah senantiasa melakukan *update* terhadap peraturan yang mengatur insentif perpajakan. Pada bulan Juli 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 ("PMK-86/2020") tanggal 16 Juli 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dalam PMK-86/2020, Pemerintah melakukan perluasan Kode Lapangan Usaha ("KLU") Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan insentif perpajakan dan memperpanjang periode insentif sampai dengan Desember 2020. Berdasarkan daftar KLU dalam lampiran PMK-86/2020, KLU Perusahaan termasuk sebagai penerima insentif PPh 21 Karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Pada bulan Januari 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atau PPnBM oleh Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung oleh BUMN sebagai Pemungut PPN. Melalui PMK-8/2021, Pemerintah mengatur bahwa dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut PPN yang merupakan BUMN atau Perusahaan Tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, maka PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Perusahaan telah melakukan penyesuaian sistem penerbitan faktur pajak dan perlakuan akuntansi sebagai implementasi atas ketentuan yang diatur dalam PMK-8/2021 tersebut.

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 ("PMK-9/2021"). Melalui PMK-9/2021, Pemerintah memperpanjang periode insentif sampai dengan masa pajak Juni 2021. Selanjutnya, dalam periode penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK No. 9/PMK.03/2021. Melalui PMK-82/2021, Pemerintah memperpanjang periode insentif sampai dengan masa pajak Desember 2021 untuk PPh Pasal 21 Karyawan DTP, PPh Final UMKM DTP, PPh Final Jasa Konstruksi DTP, pengurangan besaran angsuran PPh Ps 25 dan pengembalian pendahuluan atas kelebihan bayar PPN, serta memperpanjang periode insentif sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk pembebasan dari pemungutan PPh 22 Impor, terbatas pada wajib pajak yang memiliki KLU sesuai dengan lampiran PMK-82/2021. Berdasarkan daftar KLU dalam lampiran PMK-82/2021, KLU Perusahaan masih termasuk sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 Karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi (lanjutan)

Dalam periode penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.9/PMK.02/2021 yang menambah daftar KLU penerima insentif.

Dengan demikian, sampai dengan masa pajak Desember 2021, karyawan Perusahaan masih berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 karyawan DTP atas karyawan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK-86/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-82/2021.

29. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp18.872 miliar dan Rp16.679 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama tahun berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp190,51 dan Rp168,37 (dalam jumlah penuh) untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020.

30. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 31 tertanggal 19 Juni 2020, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan dividen kas spesial untuk tahun buku 2019 masing-masing sebesar Rp11.197 miliar (Rp113,04 per lembar saham) dan Rp4.065 miliar (Rp41,03 per lembar saham).

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn. No. 37 tertanggal 28 Mei 2021, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan dividen kas special untuk tahun buku 2020 masing-masing sebesar Rp12.482 miliar (Rp126,01 per lembar saham) dan Rp4.161 miliar (Rp42,00 per lembar saham).

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	5.903	5.557
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	742	962
Telkomsel	31a.ii	4.099	3.852
Lainnya		-	1
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		<u>10.744</u>	<u>10.372</u>
Imbalan kesehatan pasca kerja	31b	1.642	1.407
Imbalan pasca kerja lainnya	31c	316	367
Imbalan tunjangan masa kerja	31d	7	53
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	31e	880	777
Jumlah		<u>13.589</u>	<u>12.976</u>

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	597	446
Manfaat tambahan	31a.i.a.ii	-	-
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	56	88
Telkomsel	31a.ii	420	315
Beban pensiun berkala, bersih	25	<u>1.073</u>	<u>849</u>
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih	25,31b	235	214
Beban imbalan pasca kerja lainnya	25,31c	18	18
Beban imbalan tunjangan masa kerja	25,31d	3	-
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	25,31e	104	107
Jumlah		<u>1.433</u>	<u>1.188</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

a. *Funded*

i. Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Program pensiun ini diatur di dalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom (“Dapen”). Pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari perwakilan Perusahaan dan peserta.

Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan memberikan kontribusi kepada Dapen untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17 miliar dan Rp205 miliar.

Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki. Perusahaan memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* (“ALM”) yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Perusahaan adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya. Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	25.103	22.061
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	201	260
Beban bunga	1.183	1.544
Kontribusi peserta program pensiun	17	27
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(453)	2.741
Pembayaran pensiun	(1.252)	(1.530)
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	80	80
Pembayaran oleh Perusahaan	(80)	(80)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u>24.799</u>	<u>25.103</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

	30 September 2021	31 Desember 2020
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	19.546	19.723
Pendapatan bunga	917	1.383
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(453)	(201)
Kontribusi pemberi kerja	174	205
Kontribusi peserta program pensiun	17	27
Pembayaran pensiun	(1.252)	(1.530)
Beban administrasi program	(53)	(61)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	18.896	19.546
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	5.903	5.557

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, aset program terdiri dari:

	30 September 2021		31 Desember 2020	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	808	-	426	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.476	-	1.555	-
Barang konsumen primer	616	-	814	-
Bahan baku	272	-	307	-
Infrastruktur	683	-	646	-
Energi	115	-	145	-
Teknologi	74	-	-	-
Perindustrian	422	-	462	-
Barang konsumen non-primer	129	-	120	-
Properti dan <i>real estate</i>	133	-	122	-
Kesehatan	202	-	194	-
Transportasi dan logistik	17	-	2	-
Reksadana berbasis saham	519	-	678	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	4.618	-	6.208
Obligasi pemerintah	7.651	-	6.821	-
Reksadana	162	-	181	-
Saham non publik:				
Penempatan langsung	-	342	-	342
Properti	-	176	-	185
Lainnya	-	481	-	338
Jumlah	13.279	5.617	12.473	7.073

Aset program pensiun termasuk di dalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp306 miliar dan Rp338 miliar, yang mewakili 1,62% dan 1,73% dari total aset program pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp355 miliar dan Rp352 miliar mewakili masing-masing 1,88% dan 1,80% dari total aset per tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp411 miliar dan Rp1.121 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) Dapen di atas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 30 September 2021, RKD Dapen di bawah 105% sehingga Perusahaan akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti di tahun 2021.

Pada tahun 2020 dan 2021, Perusahaan memberikan manfaat kesejahteraan tambahan kepada Pensiunan dengan total masing-masing sebesar Rp80 miliar.

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (beban manfaat pensiun dibayar di muka) pada awal tahun	5.557	2.338
Beban pensiun berkala bersih	597	562
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	3	-
Kontribusi pemberi kerja (Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(174)	(205)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	453	201
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(80)	(80)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>5.903</u>	<u>5.557</u>

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban jasa	201	195
Beban administrasi program	53	54
Beban bunga bersih	266	121
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	80	80
Beban pensiun berkala bersih	600	450
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(3)	(4)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	<u>597</u>	<u>446</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada periode berjalan	(453)	1.624
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	<u>453</u>	<u>(1.624)</u>
Jumlah bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2021 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Willis Towers Watson ("WTW") (dahulu Towers Watson). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	6,50%	7,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

ii. Manfaat tambahan

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen, Perusahaan membentuk dana manfaat tambahan yang bersumber dari hasil pengembangan program pensiun paling banyak 10%, dengan ketentuan Rasio Kecukupan Dana ("RKD") di atas 105% dan tingkat pengembalian investasi di atas suku bunga aktuarial untuk pendanaan.

Aset program untuk manfaat tambahan telah disisihkan sejak 2018 sesuai persetujuan Dewan Pengawas. Pada tanggal 30 September 2021, kewajiban manfaat tambahan telah dilunasi sepenuhnya kepada penerima pensiun dan tidak ada kewajiban tambahan yang disisihkan karena persyaratan pengakuan manfaat tambahan sebagaimana tersebut di atas belum terpenuhi.

b. *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp33 miliar dan Rp41 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan penyeragaman bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan penyeragaman dengan Manfaat Pensiun Sekaligus (“MPS”). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun (“MPP”). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, di antaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Mulai tanggal 1 April 2012, karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan tanpa permohonan maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan MPS dan MPP untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	962	1.479
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	19	28
Beban bunga bersih	37	89
Laba aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(89)
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(276)	(545)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir periode	742	962

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban jasa	19	21
Beban bunga bersih	37	67
Jumlah beban manfaat pensiun	56	88

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2021 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	5,25%-6,50%	6,50%-7,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10%-8,00%	6,10%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi karyawannya. Berdasarkan program ini, karyawan berhak atas imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan gaji pokok terakhir atau gaji bersih yang diterima (tidak termasuk tunjangan fungsional) dan masa kerjanya. Program pensiun tersebut dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, melalui suatu kontrak asuransi anuitas. Hingga tahun 2004, karyawan berkontribusi pada program ini sebesar 5% dari gaji pokok bulanan mereka, sementara Telkomsel menanggung sisa besaran kontribusi yang diharuskan menurut program tersebut. Sejak tahun 2005, Telkomsel telah menanggung sepenuhnya besaran kontribusi tersebut.

Pada tahun 2020, kondisi keuangan Jiwasraya yang kurang menguntungkan telah memengaruhi secara negatif kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya kepada Telkomsel. Sebagai akibatnya, Jiwasraya dan Telkomsel menyepakati untuk merestrukturisasi program pensiun Telkomsel melalui penghentian program yang ada dan menetapkan suatu program baru dengan nilai imbalan yang dijamin sebesar Rp799 miliar pada tanggal 31 Desember 2020.

Sebagai bagian dari program restrukturisasi Jiwasraya, Indonesia Financial Group ("IFG") didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan, antara lain, pengambilalihan program-program Jiwasraya dengan pelanggannya. Setelah IFG beroperasi, imbalan baru yang dijamin tersebut di atas akan dialihkan kepada IFG oleh Jiwasraya dan dikelola dalam bentuk *saving plan* yang diperuntukkan khusus untuk mendanai imbalan pasca kerja Telkomsel.

Jumlah kontribusi Telkomsel kepada Jiwasraya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp173 miliar dan Rp53 miliar.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk program pensiun manfaat pasti:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	4.651	3.738
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	233	245
Beban bunga	299	278
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	1.585
Pembayaran pensiun	-	(50)
Beban jasa akhir	-	(1.145)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	5.183	4.651
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	799	1.529
Pendapatan bunga	112	104
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	31
Kontribusi pemberi kerja	173	53
Pembayaran pensiun	-	(50)
Kerugian atas penyelesaian	-	(868)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	1.084	799
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	4.099	3.852

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	3.852	2.209
Beban manfaat pensiun	420	142
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	1.585
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(31)
Kontribusi pemberi kerja	(173)	(53)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>4.099</u>	<u>3.852</u>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban jasa	233	184
Beban bunga bersih	187	131
Jumlah beban manfaat pensiun	<u>420</u>	<u>315</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan laporan tertanggal masing-masing 3 Maret 2021 dan 28 Februari 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	6,50%	7,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Telkom ("Yakes Telkom").

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes Telkom untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	14.443	13.823
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban bunga	716	1.083
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(413)	96
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(441)	(559)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	<u>14.305</u>	<u>14.443</u>
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	13.036	12.827
Pendapatan bunga	645	1.004
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(413)	(62)
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(441)	(559)
Beban administrasi program	(164)	(174)
Nilai wajar aset program pada akhir periode	<u>12.663</u>	<u>13.036</u>
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	<u>1.642</u>	<u>1.407</u>

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, aset program terdiri dari:

	<u>30 September 2021</u>		<u>31 Desember 2020</u>	
	<u>Harga kuotasi di pasar aktif</u>	<u>Tidak memiliki harga kuotasi</u>	<u>Harga kuotasi di pasar aktif</u>	<u>Tidak memiliki harga kuotasi</u>
Kas dan setara kas	639	-	745	-
Saham publik:				
Industri keuangan	1.167	-	1.191	-
Manufaktur dan konsumen	702	-	799	-
Infrastruktur dan telekomunikasi	333	-	344	-
Tambang	260	-	199	-
Konstruksi	177	-	219	-
Grosir	213	-	218	-
Industri lainnya:				
Jasa	131	-	99	-
Bioteknologi dan industri farmasi	114	-	96	-
Agrikultur	40	-	45	-
Lainnya	9	-	1	-
Reksadana berbasis ekuitas	548	-	519	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Reksadana pendapatan tetap	8.008	-	8.239	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	322	-	322
Jumlah	<u>12.341</u>	<u>322</u>	<u>12.714</u>	<u>322</u>

Aset program Yakes Telkom juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp239 miliar dan Rp246 miliar yang merupakan 1,87% dan 1,88% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUEN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp68 miliar dan Rp768 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 september 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	1.407	996
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala (Laba) rugi aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	235	253
	(413)	96
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	413	62
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	1.642	1.407

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 september 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban administrasi program	164	154
Beban bunga bersih	71	60
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja	235	214

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada periode berjalan	(413)	1.074
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	413	(1.074)
Jumlah bersih	-	-

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2021 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	6,75%	8,00%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2020	2019
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir ("BFPT") dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti ("BPP") dan Pesangon Meninggal Dunia ("Pesangon MD"). Pesangon MD diberikan kepada karyawan yang meninggal dunia dengan besaran sebanyak 12 kali gaji terakhir.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada awal tahun	367	366
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa kini	6	4
Beban bunga bersih	12	19
Beban jasa lalu - amandemen program	-	58
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	15
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(69)	(95)
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada akhir periode	<u>316</u>	<u>367</u>

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban jasa	6	3
Beban bunga bersih	12	15
Jumlah beban imbalan pasca kerja lainnya	<u>18</u>	<u>18</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2020 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	5,00%	6,25%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

d. Imbalan khusus masa kerja

Perusahaan memberikan Tunjangan Khusus Masa Kerja kepada karyawan dengan kriteria karyawan yang diangkat sebelum 1 Juli 2002 dan memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun serta berakhir hubungan kerja setelah 19 September 2019. Jumlah tercatat kewajiban imbalan khusus masa kerja pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp7 miliar dan Rp53 miliar. Beban tunjangan masa kerja yang dibebankan adalah sebesar Rp3 miliar dan RpNihil masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020.

e. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp880 miliar dan Rp777 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp104 miliar dan Rp107 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (Catatan 25).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

f. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (dalam miliaran Rupiah):

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat					
	Perusahaan			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya
	Funded		Unfunded			
Manfaat pasti	Manfaat tambahan					
30 September 2021						
Dalam 10 tahun kedepan	17.661	-	785	3.795	5.208	349
Dalam 10-20 tahun	21.775	-	94	10.620	6.778	102
Dalam 20-30 tahun	19.869	-	77	8.203	5.575	78
Dalam 30-40 tahun	14.599	-	20	1.035	2.479	4
Dalam 40-50 tahun	3.278	-	-	-	398	-
Dalam 50-60 tahun	378	-	-	-	6	-
Dalam 60-70 tahun	23	-	-	-	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	10,48 tahun	10,48 tahun	5,76 tahun	11,00 tahun	15,14 tahun	7,21 tahun
31 Desember 2020						
Dalam 10 tahun kedepan	18.913	-	1.061	3.795	5.649	417
Dalam 10-20 tahun	21.775	-	94	10.620	6.778	102
Dalam 20-30 tahun	19.869	-	77	8.203	5.575	78
Dalam 30-40 tahun	14.599	-	20	1.035	2.479	4
Dalam 40-50 tahun	3.278	-	-	-	398	-
Dalam 50-60 tahun	378	-	-	-	6	-
Dalam 60-70 tahun	23	-	-	-	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	10,48 tahun	10,48 tahun	5,76 tahun	11,00 tahun	15,14 tahun	7,21 tahun

g. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 atas liabilitas manfaat pasti sebagai berikut:

Sensitivitas	Tingkat diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
30 September 2021				
Didanai:				
Manfaat pasti	(2.227)	2.721	1.712	(1.528)
Tidak didanai	(33)	24	30	(39)
Telkomsel	(525)	565	550	(516)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.790)	2.317	2.227	(1.826)
Imbalan pasca kerja lainnya	(13)	15	-	-
31 Desember 2020				
Didanai:				
Manfaat pasti	(2.305)	2.754	1.733	(1.547)
Tidak didanai	(36)	28	30	(39)
Telkomsel	(471)	507	494	(463)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.807)	2.339	2.248	(1.844)
Imbalan pasca kerja lainnya	(15)	17	-	-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

g. Analisis sensitivitas (lanjutan)

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir periode pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut di atas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal lain eksternal yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

32. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan *Long Service Leaves* (“LSL”). LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp1.226 miliar dan Rp1.254 miliar masing-masing pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp129 miliar dan Rp128 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (Catatan 25).

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sepengendali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”)	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Bank milik negara Bank Mandiri	Entitas sepengendali Entitas sepengendali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BNI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Hubungan</u>	<u>Sifat Saldo Akun/ Transaksi</u>
BRI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BTN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan penghasilan pendanaan
PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Kimia Farma (Persero) ("Kimia Farma")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Garuda Indonesia (Persero) ("Garuda Indonesia")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Taspen (Persero) ("Taspen")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	Entitas sepengendali	Beban asuransi aset tetap, beban asuransi kecelakaan diri
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan beban listrik
Perum Peruri ("Peruri")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Pembangunan Perumahan Persero ("Pembangunan Perumahan")	Entitas sepengendali	Pembelian aset tetap
Bahana TCW	Entitas sepengendali	Aset keuangan tersedia untuk dijual dan obligasi
PT Sarana Multi Infrastruktur	Entitas sepengendali	Pinjaman lainnya, biaya pendanaan
Digital Aplikasi Solusi ("Digital Aplikasi Solusi"), sebelumnya Teltranet (Catatan 1d)	Entitas asosiasi	Beban CPE dan jasa sistem telekomunikasi
Indonusa	Entitas asosiasi	Beban TV berbayar
Tiphone	Entitas asosiasi	Distribusi kartu SIM dan voucher Prabayar
Finarya	Entitas asosiasi	Beban pemasaran
Teltranet	Entitas asosiasi	Beban CPE dan jasa sistem komunikasi
Yakes	Entitas berelasi lainnya	Beban pengobatan
Yayasan Pendidikan Telkom ("YPT")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopeptel")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, dan bagi hasil pendapatan PBH
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban jasa penagihan, beban jasa-jasa lainnya, distribusi kartu SIM dan voucher Prabayar, dan pembelian aset tetap
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa jaringan, beban operasi dan pemeliharaan, pembelian aset tetap dan jasa konstruksi, dan distribusi kartu SIM dan voucher Prabayar
Direksi	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Komisaris	Personil pengawas	Gaji dan fasilitas

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 30 September 2021, Grup mencatat kerugian penurunan nilai piutang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp180 miliar. Penilaian ini dilakukan di setiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	112	0,11	160	0,16
Entitas sepengendali				
Indosat	798	0,75	785	0,79
Pertamina	472	0,45	259	0,26
BNI	401	0,38	432	0,43
BRI	388	0,37	450	0,45
Bank Mandiri	172	0,16	150	0,15
Peruri	132	0,12	40	0,04
BTN	131	0,12	144	0,14
Pegadaian	103	0,10	103	0,10
PLN	88	0,08	62	0,06
Kimia Farma	84	0,08	94	0,09
Garuda Indonesia	76	0,07	76	0,08
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	659	0,62	737	0,74
Sub-jumlah	3.504	3,30	3.332	3,33
Entitas berelasi lainnya				
YPT	122	0,12	25	0,03
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	68	0,06	356	0,35
Sub-jumlah	190	0,18	381	0,38
Entitas asosiasi	15	0,01	37	0,04
Jumlah	3.821	3,60	3.910	3,91

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN				
Entitas sepengendali				
PLN	1.748	2,49	2.143	3,18
Indosat	355	0,50	412	0,61
Jasindo	283	0,40	80	0,12
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	127	0,18	109	0,16
Sub-jumlah	2.513	3,57	2.744	4,07
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	709	1,01	742	1,10
Kisel	125	0,18	1	0,00
Yakes	116	0,17	110	0,16
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	193	0,27	75	0,11
Sub-jumlah	1.143	1,63	928	1,37
Entitas asosiasi				
Indonusa	210	0,30	290	0,43
Digital Aplikasi Solusi	134	0,19	80	0,12
Finarya	97	0,14	123	0,18
Lain-lain	-	-	52	0,08
Sub-jumlah	441	0,63	545	0,81
Jumlah	4.097	5,83	4.217	6,25

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
Penghasilan pendanaan				
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	286	63,56	457	70,96
Jumlah	286	63,56	457	70,96

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
Biaya pendanaan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	13	0,38	20	0,58
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	1.004	29,64	771	22,30
Sarana Multi Infrastruktur	157	4,64	226	6,54
Jumlah	1.174	34,66	1.017	29,42

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
Pembelian aset tetap				
Entitas sepengendali				
Pembangunan Perumahan	80	0,43	-	-
Lain-lain	30	0,16	45	0,25
Sub-jumlah	110	0,59	45	0,25
Entitas berelasi lainnya				
Kopegel	119	0,64	91	0,51
Lain-lain	60	0,32	66	0,37
Sub-jumlah	179	0,96	157	0,88
Jumlah	289	1,55	202	1,13

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Distribusi kartu SIM dan voucher				
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	4.695	4,43	4.339	4,34
Gratika	273	0,26	344	0,34
Sub-jumlah	4.968	4,69	4.683	4,68
Entitas asosiasi				
Tiphone	624	0,59	1.547	1,55
Jumlah	5.592	5,28	6.230	6,23

c. Saldo akun dengan pihak berelasi

	30 September 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
Kas dan setara kas (Catatan 3)	11.171	4,53	14.745	5,97
Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	530	0,22	1.108	0,45
Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	1.351	0,55	1.644	0,67
Aset kontrak				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	49	0,02	49	0,02
Entitas sepengendali				
Taspen	153	0,06	165	0,07
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	419	0,17	376	0,15
Sub-jumlah	572	0,23	541	0,22
Entitas asosiasi	1	0,00	1	0,00
Entitas berelasi lainnya	62	0,03	8	0,00
Jumlah	684	0,28	599	0,24
Aset lancar lainnya	205	0,08	209	0,08
Aset tidak lancar lainnya	83	0,03	29	0,01

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Saldo akun dengan pihak berelasi (lanjutan)

	30 September 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
Utang usaha (Catatan 16)				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	9	0,01	1	0,00
Entitas sepengendali				
BUMN	262	0,21	337	0,27
Indosat	158	0,12	31	0,02
Lain-lain	21	0,02	17	0,01
Sub-jumlah	441	0,35	385	0,30
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	212	0,17	307	0,24
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	211	0,17	235	0,19
Sub-jumlah	423	0,34	542	0,43
Jumlah	873	0,70	928	0,73
Beban yang masih harus dibayar				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	6	0,00	4	0,00
Entitas sepengendali				
BUMN	77	0,06	98	0,08
Bank milik negara	71	0,06	40	0,03
Lain-lain	4	0,00	6	0,00
Sub-jumlah	152	0,12	144	0,11
Entitas berelasi lainnya	36	0,03	77	0,06
Jumlah	194	0,15	225	0,17
Liabilitas kontrak				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	104	0,08	97	0,08
Entitas sepengendali				
BUMN	387	0,30	350	0,28
Lain-lain	2	0,00	3	0,00
Sub-jumlah	389	0,30	353	0,28
Entitas asosiasi	2	0,00	1	0,00
Entitas berelasi lainnya	6	0,00	5	0,00
Jumlah	501	0,38	456	0,36
Deposit pada pelanggan	19	0,01	19	0,02
Utang bank jangka pendek (Catatan 19a)	6.705	5,25	3.797	3,01
Pinjaman penerusan (Catatan 20a)	429	0,34	568	0,45
Utang bank jangka panjang (Catatan 20c)	14.920	11,68	17.026	13,51
Pinjaman lainnya (Catatan 20d)	2.714	2,13	3.645	2,89

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 20a).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak (*“Public Switched Telephone Network”* atau *“PSTN”*) milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat *Multimedia Mobile* serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan *“007”*.

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif di tahun berjalan dan berlaku selanjutnya sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 18 Desember 2017, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (*“SLJJ”*), dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2018.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan PT Aplikanusa Lintasarta (*“Lintasarta”*). Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Mitratel menandatangani SPA dengan Indosat terkait pembelian menara milik Indosat. Selain itu, disepakati juga penyewaan kembali oleh Indosat atas menara telekomunikasi yang diakuisisi oleh Mitratel yang ditandai dengan penandatanganan MTLA.

iii. Lain-lain

Kisel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, percetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan voucher pulsa isi ulang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

e. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	227	0,32%	167	0,25%
Dewan Komisaris	88	0,13%	71	0,11%

Jumlah yang disajikan pada tabel di atas adalah jumlah yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan.

34. SEGMENT OPERASI

Grup memiliki empat segmen utama yang dilaporkan, yaitu *mobile*, *consumer*, *enterprise*, dan *WIB*. Segmen *mobile* menyediakan produk *mobile voice*, *SMS*, *value added service*, dan *mobile broadband*. Segmen *consumer* menyediakan jasa Indihome (terdiri dari jasa telepon tidak bergerak, TV berbayar, dan internet), dan jasa telekomunikasi lainnya yang diberikan kepada pelanggan perumahan. Segmen *enterprise* menyediakan solusi *end-to-end* ke pelanggan korporat dan institusional. Segmen *WIB* menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkuit, satelit, *VSAT*, *broadband access*, teknologi informasi, data dan jasa internet yang diberikan ke operator telekomunikasi lainnya dan pelanggan internasional. Segmen lain-lain menyediakan produk *digital content (music dan game)*, *big data*, *B2B Commerce* serta *financial service* yang diberikan kepada pelanggan perorangan maupun korporasi. Tidak terdapat segmen operasi yang digabungkan dalam menentukan laporan segmen.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai yang dipercaya manajemen untuk merepresentasikan nilai pasar.

	2021					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	62.628	18.539	13.816	10.502	234	105.719	324	106.043
Pendapatan antar segmen	2.419	914	16.182	13.095	1.657	34.267	(34.267)	-
Jumlah pendapatan segmen	65.047	19.453	29.998	23.597	1.891	139.986	(33.943)	106.043
Beban segmen	(42.663)	(13.623)	(30.106)	(16.622)	(1.733)	(104.747)	35.005	(69.742)
Hasil segmen	22.384	5.830	(108)	6.975	158	35.239	1.062	36.301
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(7.466)	(5.361)	(2.487)	(3.184)	(8)	(18.506)	(62)	(18.568)
Penyusutan dan amortisasi	(12.915)	(3.283)	(2.569)	(3.255)	(11)	(22.033)	(150)	(22.183)
Provisi diakui selama periode berjalan	(137)	(238)	(634)	18	(26)	(1.017)	(12)	(1.029)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

	2020					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	62.603	15.206	11.465	10.233	154	99.661	280	99.941
Pendapatan antar segmen	2.478	678	14.569	11.939	1.073	30.737	(30.737)	-
Jumlah pendapatan segmen	65.081	15.884	26.034	22.172	1.227	130.398	(30.457)	99.941
Beban segmen	(41.201)	(12.381)	(27.157)	(17.176)	(1.195)	(99.110)	32.180	(66.930)
Hasil segmen	23.880	3.503	(1.123)	4.996	32	31.288	1.723	33.011
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(7.058)	(5.536)	(2.691)	(2.449)	(9)	(17.743)	(179)	(17.922)
Penyusutan dan amortisasi	(12.340)	(2.766)	(2.359)	(3.421)	(18)	(20.904)	(134)	(21.038)
Provisi diakui selama periode berjalan	(51)	(434)	(694)	(35)	(2)	(1.216)	(28)	(1.244)

Penyesuaian dan eliminasi:

	2021	2020
Hasil segmen	35.239	31.288
Rugi usaha unit bisnis	(133)	(627)
Eliminasi dan penyesuaian lainnya	1.195	2.350
Laba usaha konsolidasi	36.301	33.011

Informasi geografis:

Informasi pendapatan di bawah berdasarkan lokasi unit bisnis.

	2021	2020
Pendapatan eksternal		
Indonesia	101.118	94.941
Luar negeri	4.925	5.000
Jumlah	106.043	99.941

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

	30 September 2021	31 Desember 2020
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	165.582	164.188
Luar negeri	2.805	3.581
Jumlah	168.387	167.769

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- i. Biaya aktivasi
- ii. Biaya berlangganan
- iii. Biaya penggunaan
- iv. Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- i. Tarif jasa teleponi dasar
 - ii. Tarif jelajah, dan/atau
 - iii. Tarif jasa multimedia,
- dengan struktur tarif sebagai berikut:
- i. Biaya aktivasi
 - ii. Biaya berlangganan bulanan
 - iii. Biaya penggunaan
 - iv. Biaya fasilitas tambahan.

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

35. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi (lanjutan)

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/II/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/III/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 30 September 2021, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi untuk keperluan data, internet, dan jasa teknologi dan informatika, selular, peralatan transmisi, dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah		10.287
Dolar A.S.	34	488
HKD	0,02	0
Jumlah		10.775

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan, Telin dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL") <i>Indonesia Global Gateway</i>
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	26 Maret 2019	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Radio IP <i>Backhaul</i>
Perusahaan dan PT Sisindokom Lintasbuana	14 Oktober 2020	Perjanjian pengadaan dan pemasangan Ekspan PE VPN
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	12 November 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM dan OTN <i>Platform</i> Huawei - OLO MPLS
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	7 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM dan OTN <i>Platform</i> Huawei - NARU POP
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	11 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM dan OTN <i>Platform</i> Huawei - OTN SCN
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	29 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform</i> Nokia
Perusahaan dan PT Pembangunan Perumahan	30 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan Pembangunan Konstruksi Gedung <i>Hyperscale Data Center</i>
Perusahaan dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia	19 Mei 2021	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node - B
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	21 Mei 2021	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform</i> Nokia
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	25 Mei 2021	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan PE <i>Platform</i> Juniper
Perusahaan dan PT Mastersystem Infotama	3 Juni 2021	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan IP <i>Backbone Platform</i> Cisco
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	17 Juni 2021	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Perangkat GPON – XGPON – XGSPON <i>Platform</i> Huawei
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	4 Agustus 2021	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan Metro Ethernet <i>Platform</i> Nokia

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company, dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Online Charging System</i> ("OCS") and <i>Service Control Points</i> ("SCP") <i>System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Technical Support</i> untuk Menyediakan <i>Jasa technical support</i> untuk OCS dan SCP
Telkomsel dan PT Huawei Tech Investment	25 Maret 2013	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Pengadaan <i>Gateway GPRS Support Node</i> ("GGSN") <i>Service Complex</i>
Telkomsel, Wipro Limited, dan PT WT Indonesia	23 April 2013	Perjanjian Pengembangan dan Pengadaan <i>OSDSS Solution</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN Service Complex Rollout</i>
Telkomsel, PT NSNI, NSN Oy, PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	1 Februari 2018	Perjanjian Pengadaan <i>Ultimate Radio Network Infrastructure</i> ROA dan TSA
Telkomsel, PT Dimension Data Indonesia, dan PT Huawei Tech Investment	1 April 2018	Perjanjian Pengadaan <i>Mobile Network Router Infrastructure</i>
Telkomsel, PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, dan NSN Oy.	17 April 2008 24 Mei 2019	Perjanjian Pengadaan <i>Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout</i> , telah diamandemen menjadi <i>CS Core System</i> ROA dan TSA
Telkomsel, PT Sigma Solusi Integrasi, Oracle Corporation, dan PT Phincon	5 Juli 2019	Perjanjian untuk <i>Development and Rollout Agreement</i> ("DRA") dan Dukungan Teknik pada <i>Customer Relationship Management</i> ("CRM") <i>Solution System Integrator</i>
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, dan Ericsson AB	17 April 2008 16 September 2019	Perjanjian Pengadaan <i>Combined 2G and 3G CS Core Network</i> , telah diamandemen menjadi <i>CS Core System</i> ROA dan TSA
Telkomsel, PT Sempurna Global Pratama, PT Lintas Teknologi Indonesia dan PT Ericsson Indonesia	1 September 2021	Perjanjian pengadaan <i>GGSN (Virtualized EPC)</i>

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 30 September 2021 Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	500	14 Maret 2022	Rp	93
BNI	500	31 Maret 2022	Rp	137
Bank Mandiri	500	23 Desember 2021	Rp	126
Jumlah	1.500			356

- (ii) Pada tanggal 30 September 2021, Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi untuk berbagai macam proyek sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	1.000	25 September 2022	Rp	588
BNI	2.100	11 Desember 2021	Rp	1.401
Jumlah	3.100			1.989

Fasilitas bank garansi dengan BRI dan BNI sebagian besar untuk *performance bond* dan *surety bond of radio frequency* (Catatan 36c.i)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya (lanjutan)

- (iii) Telin memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta atau setara dengan Rp215 miliar dari Bank Mandiri dan telah diperbaharui sesuai dengan adendum IX (kesembilan) pada tanggal 23 Desember 2020 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$25 juta atau setara dengan Rp358 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 23 Desember 2021. Pada tanggal 30 September 2021, Telin belum menggunakan fasilitas bank garansi tersebut.

c. Lainnya

(i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 tanggal 2 November 2015, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 76 tanggal 15 Desember 2010, Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900 MHz, dan 1800 MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan sejak 2010.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 018/TEL.01.02/2019 Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 dari Menkominfo yang menggantikan Surat Keputusan No. 1987 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017, Menkominfo memberikan wewenang kepada Telkomsel untuk:

1. Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan
2. Layanan telekomunikasi dasar.

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 445 Tahun 2021, No. 620 Tahun 2020, No. 806 Tahun 2019, No. 1896 Tahun 2017, Telkomsel diharuskan, antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Mengeluarkan setiap tahunnya *performance bond* sebesar Rp20 miliar dan *surety bond* sebesar Rp599 miliar pada tahun 2021 untuk pita frekuensi 2,1 GHz.
3. Mengeluarkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz.
4. Mengeluarkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp360 miliar untuk pita frekuensi 2,3 GHz pada tahun 2021.

(ii) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2022 hingga 2032. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Kurang dari 1 tahun	2.412	2.012
1-5 tahun	7.347	5.909
Lebih dari 5 tahun	5.277	4.378
Jumlah	15.036	12.299

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iii) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Selanjutnya, Peraturan Menkominfo No. 17 tahun 2016 tanggal 26 September 2016 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 19 tahun 2016 yang berlaku pada tanggal 4 November 2016. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kontribusi pengembangan KPU berlaku efektif untuk tahun 2016 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015, dalam hal penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah pedesaan (Program KPU), penyedia dipilih melalui proses seleksi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"). BPPPTI menggantikan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 3 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018, BPPPTI berganti nama menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"). Berikutnya, Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 10 tahun 2018.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Mitratel pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (Upgrading) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No. 792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BPPPTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp217 miliar, dan sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini Telkomsel telah menerima pembayaran dari BAKTI sebesar Rp91 miliar (sebelum pajak) di tahun 2019 dan tidak ada pembayaran tambahan selama tahun 2020.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	30 September 2021			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	302,57	0,75	17,24	4.579
Aset keuangan lancar lainnya	11,99	-	-	172
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,04	-	-	1
Pihak ketiga	143,66	-	4,43	2.118
Piutang lain-lain	0,04	-	0,03	1
Aset lancar lainnya	0,30	-	0,53	11
Aset tidak lancar lainnya	665,93	-	8,72	9.651
Jumlah aset	<u>1.124,53</u>	<u>0,75</u>	<u>30,95</u>	<u>16.533</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,08)	-	-	(1)
Pihak ketiga	(113,07)	(3,30)	(3,89)	(1.674)
Utang lain-lain	(4,14)	-	(6,43)	(151)
Biaya yang masih harus dibayar	(53,59)	(29,11)	1,63	(748)
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	-	-
Uang muka pelanggan	(0,30)	-	-	(4)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(20,06)	(767,90)	(0,75)	(396)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(36,49)	(1.919,74)	(33,83)	(1.252)
Liabilitas lainnya	(0,42)	-	-	(6)
Jumlah liabilitas	<u>(228,15)</u>	<u>(2.720,05)</u>	<u>(43,27)</u>	<u>(4.232)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>896,38</u>	<u>(2.719,30)</u>	<u>(12,32)</u>	<u>12.301</u>

	31 Desember 2020			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	193,91	0,68	15,34	2.947
Aset keuangan lancar lainnya	57,08	-	-	802
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,73	-	0,03	10
Pihak ketiga	160,56	-	7,15	2.364
Piutang lain-lain	0,38	-	0,15	8
Aset lancar lainnya	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	114,37	59,99	9,37	1.747
Jumlah aset	<u>527,03</u>	<u>60,67</u>	<u>32,04</u>	<u>7.878</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,02)	-	-	(0)
Pihak ketiga	(142,68)	(21,54)	(6,28)	(2.104)
Utang lain-lain	(3,58)	-	(2,07)	(79)
Biaya yang masih harus dibayar	(52,23)	(10,43)	(1,52)	(759)
Utang bank jangka pendek	(6,17)	-	-	(87)
Uang muka pelanggan	(0,17)	-	-	(2)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(25,07)	(767,90)	(20,66)	(746)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(47,54)	(2.303,69)	(6,49)	(1.073)
Liabilitas lainnya	(12,49)	-	-	(176)
Jumlah liabilitas	<u>(289,95)</u>	<u>(3.103,56)</u>	<u>(37,02)</u>	<u>(5.026)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>237,08</u>	<u>(3.042,89)</u>	<u>(4,98)</u>	<u>2.852</u>

*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 30 September 2021 menggunakan kurs tanggal 23 November 2021, kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp33 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

i. Klasifikasi

(a) Aset keuangan

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	17.491	20.589
Aset keuangan lancar lainnya	589	1.194
Piutang usaha, bersih	11.273	11.339
Piutang lain-lain, bersih	170	214
Aset kontrak	1.299	1.239
Aset tidak lancar lainnya	208	215
Nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	10.081	4.045
Aset keuangan lancar lainnya	78	109
Jumlah aset keuangan	<u>41.189</u>	<u>38.944</u>

(b) Liabilitas keuangan

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang usaha dan utang lain-lain	14.479	17.577
Beban yang masih harus dibayar	13.382	14.265
Utang bank jangka pendek	10.618	9.934
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	429	568
Obligasi dan wesel bayar	6.992	7.469
Utang bank jangka panjang	33.615	28.229
Liabilitas sewa	14.134	15.617
Pinjaman lainnya	2.714	3.645
Jumlah liabilitas keuangan	<u>96.363</u>	<u>97.304</u>

ii. Nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan:

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
30 September 2021					
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Aset keuangan lancar lainnya	78	78	78	-	-
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	10.081	10.081	-	6.756	3.325
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	429	425	-	-	425
Obligasi dan wesel bayar	6.992	8.034	8.034	-	-
Utang bank jangka panjang	33.615	33.899	-	-	33.899
Liabilitas sewa	14.134	14.134	-	-	14.134
Pinjaman lainnya	2.714	2.720	-	-	2.720
Jumlah	<u>68.043</u>	<u>69.371</u>	<u>8.112</u>	<u>6.756</u>	<u>54.503</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Nilai wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan (lanjutan):

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
31 Desember 2020					
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Aset keuangan lancar lainnya	109	109	77	-	32
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	4.045	4.045	-	2.115	1.930
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman:					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	568	575	-	-	575
Obligasi dan wesel bayar	7.469	8.503	8.017	-	486
Utang bank jangka panjang	28.229	28.301	-	-	28.301
Liabilitas sewa	15.617	15.617	-	-	15.617
Pinjaman lainnya	3.645	3.631	-	-	3.631
Liabilitas lainnya	169	169	-	-	169
Jumlah	59.851	60.950	8.094	2.115	50.741

Keuntungan atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 senilai RpNihil. Tidak ada perpindahan antar hirarki nilai wajar selama tahun 2021.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	1.962	1.053
Penyesuaian saldo awal PSAK 71	-	294
Laba yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	-	128
Pembelian/penambahan	1.452	711
Penjualan/pengurangan	(89)	(224)
Saldo akhir	3.325	1.962

iii. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dan liabilitas tidak lancar lainnya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

iii. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (a) Nilai wajar pada laporan laba rugi, terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik penilaian. Nilai wajar dari obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (b) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- (a) Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- (b) Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga pasar, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh Unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	30 September 2021		31 Desember 2020	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	1,12	0,00	0,52	0,06
Liabilitas keuangan	(0,23)	(2,72)	(0,29)	(3,10)
Eksposur bersih	0,89	(2,72)	0,23	(3,04)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 30 September 2021 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	Ekuitas/ laba (rugi)
30 September 2021	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	128
Yen Jepang (penguatan 5%)	(17)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 30 September 2021 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

ii. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Kinerja aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 30 September 2021, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

iii. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 19 dan 20). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Pinjaman bunga tetap	(23.318)	(27.474)
Pinjaman bunga mengambang	(45.184)	(37.988)

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 30 September 2021, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp113 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	<u>30 September 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Kas dan setara kas	17.491	20.589
Aset keuangan lancar lainnya	667	1.303
Piutang usaha, bersih	11.273	11.339
Piutang lain-lain, bersih	170	214
Aset kontrak	1.299	1.239
Aset tidak lancar lainnya	208	215
Jumlah	<u>31.108</u>	<u>34.899</u>

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan. Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Corporate Finance* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup.

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit dimana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 3,84% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 30 September 2021.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

v. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio lancar dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2022	2023	2024	2025	2026 dan selanjutnya
30 September 2021							
Utang usaha dan lain-lain	14.479	(14.479)	(14.479)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	13.382	(13.382)	(13.382)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	429	(453)	(156)	(66)	(131)	(100)	-
Obligasi dan wesel bayar	6.992	(13.002)	(2.871)	(127)	(507)	(507)	(8.990)
Utang bank	44.233	(50.154)	(18.448)	(1.800)	(8.276)	(7.131)	(14.499)
Pinjaman lainnya	2.714	(2.948)	(1.166)	(145)	(1.115)	(522)	-
Liabilitas sewa	14.134	(16.144)	(6.578)	(630)	(3.069)	(1.916)	(3.951)
Jumlah	96.363	(110.562)	(57.080)	(2.768)	(13.098)	(10.176)	(27.440)

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2021	2022	2023	2024	2025 dan selanjutnya
31 Desember 2020							
Utang usaha dan lain-lain	17.577	(17.577)	(17.577)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	14.265	(14.265)	(14.265)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	568	(609)	(204)	(160)	(138)	(107)	-
Obligasi dan wesel bayar	7.469	(14.052)	(1.231)	(2.817)	(507)	(507)	(8.990)
Utang bank	38.163	(42.782)	(19.097)	(6.289)	(5.637)	(4.745)	(7.014)
Pinjaman lainnya	3.645	(4.164)	(1.291)	(1.210)	(1.138)	(525)	-
Liabilitas sewa	15.617	(17.678)	(6.096)	(3.812)	(2.887)	(1.864)	(3.019)
Liabilitas lainnya	169	(199)	(11)	(47)	(47)	(47)	(47)
Jumlah	97.473	(111.326)	(59.772)	(14.335)	(10.354)	(7.795)	(19.070)

Perbedaan antara nilai buku tercatat dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	30 September 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	10.618	6,13%	9.934	5,91%
Utang jangka panjang	57.884	33,42%	55.528	33,06%
Total utang	68.502	39,56%	65.462	38,97%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	104.720	60,44%	102.527	61,03%
Jumlah	173.222	100,00%	167.989	100,00%

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau di bawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Jumlah utang dengan bunga	68.502	65.462
Dikurangi: kas dan setara kas	(17.491)	(20.589)
Utang bersih	51.011	44.873
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	104.720	102.527
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	48,71%	43,77%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 20, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh pemberi pinjaman. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, Grup sudah memenuhi beberapa persyaratan modal yang telah diberlakukan secara eksternal dengan pengecualian untuk beberapa entitas tertentu di dalam Grup (Catatan 20).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2021 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

- a. Aktivitas non-kas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	3.546	5.754
Kapitalisasi bunga	25	89
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	2.612	-
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	319	316

- b. Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2021	Arus kas	Perubahan nontunai			30 September 2021
			Perubahan valuta asing	Sewa baru	Perubahan lainnya	
Utang bank jangka pendek	9.934	685	(1)	-	-	10.618
Pinjaman penerusan (<i>two step loan</i>)	568	(116)	(23)	-	-	429
Obligasi dan wesel bayar	7.469	(478)	-	-	1	6.992
Utang bank jangka panjang	28.229	5.383	10	-	(7)	33.615
Pinjaman lainnya	3.645	(935)	-	-	4	2.714
Liabilitas sewa	15.617	(4.102)	-	2.612	7	14.134
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	65.462	437	(14)	2.612	5	68.502

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- a. Pada tanggal 22, 27, dan 28 Oktober 2021, Telkomsel melakukan pelunasan pinjaman kepada Bank Mandiri, BSI, dan MUFG Bank masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp150 miliar, dan Rp150 miliar.
- b. Pada tanggal 26 Oktober 2021, GSD melakukan penarikan *refinancing* dari bank HSBC sebesar Rp230 miliar.
- c. Pada tanggal 29 Oktober 2021 Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang tersebut mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sehingga tarif PPh Badan untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya sebesar 22%.
- d. Pada tanggal 18 November 2021, Perusahaan melakukan penarikan *refinancing* dari Bank Mandiri sebesar Rp2.400 miliar dan pada tanggal 19 November 2021, Perusahaan melakukan pelunasan pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp4.400 miliar.
- e. Pada tanggal 22 November 2021, Mitratel telah menyelesaikan proses IPO atas 23.493.524.800 saham. Kepemilikan saham Perusahaan pada Mitratel berubah menjadi 71,87% dan kepemilikan masyarakat sebesar 28,13%.